

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN INTERNAL DOSEN
Progam Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



***Model Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Desa Wisata
Edukasi Di Kabupaten Bojonegoro**

Tim Peneliti:

Dr. Ahmad Suprastiyo, S.Sos., M.Si.

Musta'ana, S.Sos., M.Si.

Ratu Syifa Tamala Musyafak

Dibiayai oleh:

Universitas Bojonegoro

Periode 1 Tahun Anggaran 2024/2025

Nomor Kontrak :

011/LPPM-LIT/UB/XI/2024

UNIVERSITAS BOJONEGORO

2025

HALAMAN PENGESAHAN

PROPOSAL PENELITIAN PENDANAAN PERGURUAN TINGGI

1. **Judul Penelitian** : Model Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Desa Wisata Edukasi Di Kabupaten Bojonegoro
2. **Ketua Peneliti**
 - a. Nama Peneliti : Ahmad Suprastiyo
 - b. NIDN : 0727048901
 - c. Program Studi : Administrasi Publik
 - d. E-mail : tiyopras207@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Sosial Humaniora
3. **Anggota Peneliti 1**
 - a. Nama (Dosen) : Musta'ana
 - b. NIDN : 0724037602
 - c. Program Studi : Administrasi Publik
 - d. E-mail : anarochim@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Sosial Humaniora
- Anggota Peneliti 2**
 - a. Nama (Mahasiswa) : Ratu Syifa Tamala Musyafak
 - b. NIM : 22632011112
 - c. Program Studi : Administrasi Publik
 - d. E-mail : -
 - e. Bidang Keilmuan : Sosial Humaniora
4. Jangka Waktu Penelitian : 3 bulan
6. Lokasi Penelitian : Bojonegoro
7. Dana Diusulkan : Rp. 3.000.000,-

Bojonegoro, 24 Februari 2025

Mengetahui,
Ketua LPPM Universitas Bojonegoro

Pengusul,

Dr. Laily Agustina R, S.Si., M.Sc.
NIDN 07 2108 8601

Dr. Ahmad Suprastiyo, M.Si.
NIDN. 07 2704 8901

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr wb, dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul : Model *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Desa Wisata Edukasi Di Kabupaten Bojonegoro.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih ada keterbatasan, baik dari segi metodologi maupun dari substansi materi. Namun demikian, besar harapan penulis bahwa penelitian ini dapat memberi gambaran tentang hasil penelitian yang telah penulis lakukan, serta bisa memberikan rekomendasi kepada stake holder terkait dan menambah literature studi penelitian bidang administrasi publik.

Bojonegoro, Februari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
Abstrak	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1. Penelitian Terdahulu	4
2.2. Konsep Collaborative Governance	6
BAB III METODE PENELITIAN	15
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	15
3.2. Lokasi Penelitian.....	16
3.3. Informan Penelitian.....	16
3.4. Fokus Penelitian.....	17
3.5. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	18
3.6. Analisis Data	19
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	21
4.1. Data Penelitian	21
4.2. Pembahasan.....	41
BAB V PENUTUP	47
5.1. Kesimpulan	47
5.2. Saran.....	47

ABSTRAK

Tata kelola pariwisata memegang peranan yang penting dalam keberlanjutan destinasi wisata, kajian beberapa penelitian destinasi wisata baru-baru ini telah mengeksplorasi peran berbagai aktor dalam mengatur destinasi, namun belum secara komprehensif menyelidiki proses tata kelola kolaboratif yang mendasari seperti dialog tatap muka, membangun kepercayaan, pemahaman bersama, atau faktor pendukung seperti pengaturan kelembagaan atau kepemimpinan. Pemerintah Desa Pejambon dalam mengembangkan destinasi desa wisata akan berdampak terhadap kenaikan ekonomi masyarakat lokal dan pendapatan asli Desa Pejambon. Namun, saat pandemi covid-19 terjadi penurunan kunjungan wisatawan yang signifikan berdasarkan data.bojonegorokab.go.id pada tahun 2020 jumlah wisatawan 19.007, menjadi 2.244 wisatawan pada tahun 2021, sehingga terjadi penurunan 16.763 wisatawan. Maka penting untuk dilakukan penelitian tata kelola desa wisata edukasi pedesaan dengan pendekatan collaborative governance untuk memotret tata kelola baru dalam pengelolaan desa wisata. Tujuan penelitian ini ialah mengidentifikasi dan merumuskan model collaborative governance dalam pengelolaan desa wisata edukasi di Kabupaten Bojonegoro. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Temuan penelitian collaborative governance dalam pengembangan desa wisata Pejambon telah menerapkan kolaborasi antara pemerintah, BUMDes, masyarakat, dalam penyusunan anggaran untuk mengembangkan desa wisata Pejambon, kerjasama yang selalu melibatkan 5 aktor saling keterkaitan di Desa Pejambon, terstruktur dan komitmen memberikan tambahan kas untuk Desa.

Kata Kunci : Collaborative Governance, Desa Wisata, Edukasi, Perdesaan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complecity, and Ambiguity*) dunia dilanda ketidakpastian yang menimpa sektor politik, ekonomi, teknologi, pemerintahan dan pariwisata, hal ini menjadi penting bagi pemimpin organisasi publik untuk selalu mampu menghadapi era VUCA pada lingkungannya (Mishra, 2020), (Tomažević et al., 2023). Pandemi covid-19 merupakan bukti era VUCA yang berdampak besar terhadap sektor ekonomi khususnya industri pariwisata, dengan tantangan-tantangan baru yang memerlukan kombinasi perspektif tata kelola jangka pendek, menengah dan panjang, sehingga memerlukan model tata kelola pariwisata dengan kebutuhan zaman baru (Naz & Groves, 2020), (Vargas, 2020), (Robina-Ramírez et al., 2021).

Tata kelola pariwisata memegang peranan yang penting dalam keberlanjutan destinasi wisata, kajian beberapa penelitian destinasi wisata baru-baru ini telah mengeksplorasi peran berbagai aktor dalam mengatur destinasi, namun belum secara komprehensif menyelidiki proses tata kelola kolaboratif yang mendasari seperti dialog tatap muka, membangun kepercayaan, pemahaman bersama, atau faktor pendukung seperti pengaturan kelembagaan atau kepemimpinan (Bichler & Lösch, 2019). Menurut Sinaga (2021) bahwa proses pembangunan pariwisata belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan kolaboratif, apabila belum terbentuk kepercayaan pada masing-masing aktor yang terlibat. Tantangan pendekatan kolaboratif berasal dari political-will pimpinan, kepercayaan kolektif masyarakat, serta standarisasi akubtabilitas bagi stakeholder yang terlibat dalam kebijakan pariwisata (Wijaya et al., 2023). Pengelolaan wisata membutuhkan keterlibatan berbagai pihak yang terdiri dari pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok sadar wisata, dan pihak swasta dan dilakukan secara optimal (Prasetyo, 2023), (Farizky et al., 2022).

Pariwisata memiliki potensi besar dalam menghasilkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pariwisata sebuah Negara dapat menarik

wisatawan dalam negeri maupun dari luar negeri seperti Negara Indonesia memiliki potensi wisata yang besar, hal ini terpotret dari pendapatan devisa dari sektor pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia mencatat pendapatan devisa mencapai US\$ 10,46 miliar hingga September 2023. Di beberapa daerah, salah satu potensi ekonomi yang dapat dikembangkan yaitu pariwisata. Pariwisata sebagai alat pelestari kebudayaan, dapat berperan aktif dalam melestarikan dan memperkenalkan hasil budaya daerah. Pariwisata yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dapat membangun dan mengembangkan kebudayaan dan industri pariwisata dengan pelaku utama yang menggerakkan roda pembangunan destinasi wisata antara lain pemerintah, dunia usaha atau industry, masyarakat lokal, media massa, non governmental organization (NGO) dan akademisi. Maka, dibutuhkan suatu kolaborasi dan integritas aktor-aktor didalam dan ketersediaan daya dukung tersebut tidak dapat dijalankan oleh salah satu aktor saja tetapi harus melibatkan aktor-aktor yang dapat mendukung pengembangan destinasi wisata.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan pembangunan ekonomi Desa melalui Program Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID PEL) dengan memilih 100 Desa untuk mendapatkan pendanaan program PIID PEL. Desa Pejambon di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu Desa yang terpilih mendapatkan program PIID PEL untuk pengembangan ekonomi di tingkat Desa dengan konsep Desa Wisata Edukasi pada tahun 2019. Desa Wisata Edukasi Pejambon menggabungkan konsep edukasi pertanian dan edukasi outdoor dengan beberapa fasilitas yaitu Taman Bestari, Wisata Tengah Sawah, Museum Pertanian, Wisata Pelestarian Budaya, Wahana Out Bound, Kolam renang, dan berbagai permainan seperti flying fox dan motor ATV. Selama ini dalam pengembangan sektor pariwisata di Desa Pejambon, peran Pemerintah Desa dan Badan Usaha Milik Desa menjadi kunci utama.

Pemerintah Desa Pejambon dalam mengembangkan destinasi desa wisata akan berdampak terhadap kenaikan ekonomi masyarakat lokal dan pendapatan asli Desa Pejambon. Namun, masih ada permasalahan yang timbul dalam

Pemerintahan Desa Pejambon terkait keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan pengelolaan anggaran pemerintah desa dengan masyarakat setempat, maka *collaborative governance* dalam pengembangan destinasi wisata Desa Pejambon diperlukan peran masing-masing aktor dalam tata kelola destinasi wisata desa sebagai bentuk wujud kolaborasi antar stakeholder. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ansell, C., & Gash (2008) bahwa kolaborasi dimulai dari pengambilan keputusan, implementasi sampai dengan evaluasi pemerintah dengan masyarakat dan stakeholder terkait pada semua aspek yang memiliki kepentingan dalam kebijakan untuk membuat keputusan bersama dengan berbagai kekuatan (Ansell, C., & Gash, 2008). Selain itu, terjadi penurunan kunjungan wisatawan yang signifikan saat pandemi covid-19 berdasarkan data.bojonegorokab.go.id pada tahun 2020 jumlah wisatawan 19.007, menjadi 2.244 wisatawan pada tahun 2021, sehingga terjadi penurunan 16.763 wisatawan. Maka penting untuk dilakukan penelitian tata kelola desa wisata edukasi pedesaan dengan pendekatan *collaborative governance* untuk memotret tata kelola baru dalam pengelolaan desa wisata.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Model *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Desa Wisata Edukasi Di Kabupaten Bojonegoro?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengidentifikasi dan merumuskan Model *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Desa Wisata Edukasi Di Kabupaten Bojonegoro.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan mampu merumuskan Model *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Desa Wisata Edukasi Di Kabupaten Bojonegoro, serta sebagai rekomendasi bagi pengelola desa wisata lainnya di Kabupaten Bojonegoro.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Memuat penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan permasalahan penelitian (sekurang-kurangnya 5 penelitian) di sajikan dalam bentuk tabel dan diurutkan berdasarkan tahun termuda ke tahun tertua.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Hal yang Dipergunakan	Perbedaan dengan Penelitian
1	Siakwah, P Musaveng, R (2020), <i>Tourism governance and attainment of the sustainable development goals in Afrika</i> (Siakwah et al., 2020)	Kolaborasi pemerintah, swasta, masyarakat lokal dalam melestarikan dan melindungi pariwisata.	Kolaborasi aktor pemerintah, swasta, masyarakat lokal.	Penelitian terdahulu fokus pada kolaborasi aktor. Penelitian ini fokus pengembangan tata kelola pariwisata dengan pendekatan konsep kelembagaan dan nilai <i>agile governance</i> .
2	Ndivo, R M Okech, R N (2020), <i>Tourism governance in transition period: restructuring Kenya's tourism administration from centralized to devolved system</i>	Restrukturisasi pengelolaan pariwisata dari pemerintahan pusat ke desentralisasi.	Pengelolaan pariwisata yang terdesentralisasi.	Penelitian terdahulu fokus pada peralihan pengelolaan pariwisata terpusat ke desentralisasi. Penelitian ini fokus pengembangan tata kelola pariwisata dengan pendekatan konsep kelembagaan

	(Ndivo & Okech, 2020)			dan nilai <i>agile governance</i> .
3	Hulu, Aldin, Deva Puspasari, Lidya Tri, Adistia Pramudita, Nandy Juniyanto, and Tistry Rahmatiwani Putuninno. 2020. "Menggagas Revolusi Mental Birokrasi Melalui Konsep Competitive Agile Leadership" 2 (1): 29–37.	Untuk mengetahui formula revolusi mental birokrasi melalui konsep <i>agile leadership</i> ..	Pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam.	Hasil penelitian bahwa kepala desa mampu membuat berbagai program inovasi dalam menyelesaikan segala permasalahan, sehingga membuktikan kepemimpinan yang <i>agile</i>
4	Luna, AJHO Marinho, MLM Muara, H P de (2020), <i>Agile governance theory : operationalization</i> (Luna et al., 2020)	Konsep <i>agile governance</i> yaitu <i>good enough governance, business-driven, human focused, based on quick wins, systematic and adaptive approach, simple design and continuous refinement.</i>	Konsep <i>agile governance</i>	Penelitian terdahulu menemukan konsep <i>agile governance</i> untuk tata kelola dimasa depan Penelitian ini untuk mengembangkan tata kelola pariwisata dengan pendekatan konsep kelembagaan dan nilai <i>agile governance</i> .
5	Dangi, T B Petrick, J F (2021), <i>Augmenting the role of tourism governance in</i>	Diperlukan tata kelola pariwisata yang lebih proaktif, inklusif, dan berorientasi	Tata kelola pariwisata yang proaktif, inklusif dan berkelanjutan	Penelitian terdahulu fokus pada konsep tata kelola pariwisata yang dibutuhkan. Penelitian ini fokus

<i>addressing destination justice, ethics, and equity for sustainable community-based tourism</i> (Dangi & Petrick, 2021)	pada etika kepedulian guna pembangunan pariwisata berkelanjutan.		pengembangan tata kelola pariwisata dengan pendekatan konsep kelembagaan dan nilai <i>agile governance</i> .
---	--	--	--

Sumber: Hasil penelitian sebelumnya diolah Peneliti (2024)

2.2 Konsep Collaborative Governance

a. Pengertian Collaborative

Kata “*collaborative*” berasal dari bahasa Inggris yaitu “*colabour*” yang artinya bekerja sama. Kolaborasi merupakan istilah umum yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu hubungan kerja sama yang dilakukan oleh satu pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Dalam melakukan kolaborasi tersebut diperlukan beberapa pihak mulai dari tingkat individu, kelompok, maupun organisasi lain untuk memecahkan masalah secara bersama-sama.

Namun demikian, pengertian tersebut bukanlah merupakan pengertian tunggal dari konsep kolaborasi. Banyak pengertian tentang kolaborasi yang dikemukakan oleh berbagai para ahli dengan sudut pandang yang beragam. Demikian halnya yang dikatakan oleh Roucek dan Warren bahwa “kolaborasi berarti bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama” dan kolaborasi melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.

Hal ini sejalan dengan pendapat Ansell and Gash (Sudarmo, 2011) yang menjelaskan bahwa pengertian kolaborasi secara umum dibedakan menjadi dua pengertian yaitu :

1. kolaborasi proses, adalah serangkaian kegiatan atau tata cara dalam mengelola atau memerintah secara institusional. Dalam pengertian ini, ada beberapa lembaga atau institusi yang terlibat baik itu lembaga pemerintah maupun non pemerintah.
2. kolaborasi normatif, adalah tujuan atau aspirasi pemerintah dalam

melakukan interaksi dengan para mitranya.

Inayah Suryani (2013:15) mengatakan bahwa kolaborasi menjadi hal penting karena permasalahan publik yang kompleks sehingga tidak bisa ditangani dan diselesaikan tuntas oleh satu institusi saja, melainkan oleh beberapa institusi agar permasalahan publik bisa diminimalisir secara optimal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi adalah kerjasama dari beberapa elemen yang terkait baik individu dengan lembaga atau berbagai pihak dalam mencapai tujuan yang sama.

b. Pengertian Governance

Konsep governance berangkat dari istilah government. Government merupakan istilah yang digunakan pada lembaga yang melaksanakan kekuasaan pemerintah pada suatu negara, dalam hal ini penyelenggaraan pemerintahan ditekankan pada pemerintah sebagai pengatur dan pelaksana tunggal tugas pemerintahan. Oleh sebab itu, muncullah konsep governance yang menggantikan konsep government. Definisi governance berasal dari kata “govern” yakni mengambil peran yang lebih besar, yang terdiri dari semua proses, aturan dan lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian masalah-masalah kolektif masyarakat.

Dengan demikian secara luas, governance termasuk totalitas dari semua lembaga dan unsur masyarakat, baik pemerintah maupun non pemerintah. Sementara itu, Dwiyanto (2015) menekankan mengenai konsep governance adalah keterlibatan aktor-aktor di luar pemerintah yang merespon masalah publik. Praktik governance ini, bertujuan dalam rangka menyediakan pelayanan publik dengan melibatkan aktor dari unsur masyarakat dan mekanisme pasar.

Selanjutnya, Roderick Arthur William Rhodes menjelaskan beberapa karakter dominan dari governance meliputi:

- 1) “Governance” bermakna lebih luas daripada government dengan melibatkan aktor non-negara yang menjadikan ada hubungan saling ketergantungan antar organisasi;
- 2) Keberlanjutan hubungan interaksi antar anggota karena dilatarbelakangi kebutuhan pertukaran sumber daya dan negosiasi untuk membagi

bersama;

- 3) Berakar pada hubungan saling percaya dan diregulasikan dengan peraturan akibat dari negosiasi dan kesepakatan antar aktor;
- 4) Memiliki derajat signifikan untuk terlepas atau otonom dari pemerintah.

Maka dari itu, bahwa *governance* merupakan model pemerintahan yang sangat dinamis. Dengan kata lain, *governance* membuka ruang untuk keterlibatan atau partisipasi sektor lain dalam pemerintahan. Pemerintah bukanlah aktor yang tunggal atau dominan dalam pemerintahan. Selain itu, pendapat tersebut menjelaskan bahwa terjadi pengurangan terhadap otoritas pemerintah terkait dengan urusan publik.

c. Collaborative Governance

Collaborative governance adalah proses kolaborasi dalam memecahkan suatu permasalahan yang terjadi melalui kerjasama antara stakeholder yang terkait. Ansell and Gash (Sudarmo, 2011) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai berikut: “A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets.”

Dengan demikian, dapat diartikan kolaborasi merupakan suatu upaya untuk membuat aturan yang mengatur dua lembaga atau lebih yang mengurus urusan publik baik langsung maupun tidak langsung. Lembaga tersebut sama-sama memiliki kepentingan dalam mengatur urusan non-negara. Dalam menjalankan kolaborasi, masing-masing pihak harus memiliki keterikatan secara formal dan memiliki komitmen kuat terhadap apa yang menjadi kesepakatan diawal. Tugas-tugas dipercayakan secara penuh kepada masing-masing pihak dengan tetap melaksanakan koordinasi dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program-program yang menyangkut kepentingan publik.

Collaborative governance berfokus pada kebijakan dan masalah publik. Hal yang menjadi pembeda dengan konsep *governance* lainnya adalah fokusnya pada isu-isu dan permasalahan yang berkaitan dengan publik dengan pemecahan masalah. Adanya keterkaitan stakeholder biasanya akan menjadi masalah, namun

konsep collaborative governance hadir untuk menjadikan hal tersebut sebagai sebuah kerjasama antara stakeholder dengan lembaga publik (pemerintah).

Dari definisi diatas menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan tidak akan tercapai apabila dilakukan secara independent. Konsep kolaborasi ini juga menyiratkan bahwa non-state stakeholders akan memiliki tanggung-jawab yang nyata untuk menghasilkan kebijakan. Oleh karena itu, stakeholders yang terlibat harus berhubungan langsung dalam pengambilan keputusan. Hal ini dipertegas oleh Agrawal dan Lemos (Subarsono, 2011) collaborative governance tidak hanya terbatas pada pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah dan non-pemerintah tetapi juga terbentuk atas adanya “multipartner governance” yang meliputi sektor privat/ swasta, masyarakat dan komunitas sipil dan terbangun atas sinergi peran pemangku kepentingan dan penyusunan rencana yang bersifat “hybrid” seperti halnya kerja sama publik-privat-sosial.

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa kolaborasi digunakan untuk menyatukan perbedaan sudut pandang serta menyatukan tujuan yang berbeda maupun sama untuk lebih mengedepankan nilai-nilai bersama dan untuk menghasilkan keputusan yang menguntungkan bagi semua pihak.

Menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh mengatakan bahwa ada beberapa proses kolaborasi yaitu dinamika kolaborasi, tindakan kolaborasi, serta dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi. Dalam proses kolaborasi, dinamika kolaborasi merupakan bagian yang paling penting. Seberapa baik pelaksanaan kolaborasi terdapat pada dinamika yang meliputi penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas melakukan tindakan bersama. Kemudian tindakan dalam kolaborasi merupakan cerminan daripada kolaborasi, karena hasil tindakan tersebut secara langsung membawa dampak sementara yang akan mengarah kembali pada dinamika kolaborasi dan dampak yang jangka panjang.

Berdasarkan beberapa pendekatan para ahli diatas, dijelaskan bahwa terdapat beberapa kegiatan pemerintah yang tidak dapat dilakukan sendiri, perlu adanya kerjasama antar pihak agar pemerintah lebih mudah dalam menangani permasalahan di lapangan. Seperti halnya dalam menangani kekerasan pada anak yang berada di Kabupaten Bojonegoro. Dalam mengatasi masalah tersebut,

perlu adanya proses kerjasama kolektif dari berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam mencapai tujuan yang sama yaitu menghapus kasus kekerasan pada anak.

a. Indikator Keberhasilan Collaborative Governance

Edward DeSeve dalam (Sudarmo, 2011) mengemukakan bahwa terdapat delapan item penting yang bisa dijadikan ukuran atau indikator keberhasilan proses kolaborasi dalam governance. Delapan item tersebut yang akan peneliti gunakan untuk melihat proses Collaborative Governance Dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Bojonegoro antara lain :

a) Networked structure (struktur jaringan)

Yaitu menjabarkan secara konseptual terkait antara elemen yang satu dengan elemen yang lain untuk mencerminkan unsur- unsur fisik dari jaringan yang ditangani. Untuk melihat struktur jaringan yang dibangun dalam pencegahan tindak kekerasan pada anak di Kabupaten Bojonegoro, akan dilihat dari sisi kolaborasi antar para pemangku kepentingan yang terlibat dan sinergitas yang dibangun antar para pemangku kepentingan tersebut

b) Commitment to a common purpose (komitmen terhadap tujuan)

Mengacu pada mengapa sebuah jaringan harus ada, yaitu karena perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan yang positif. Tujuan terhadap komitmen bisa dilihat dari misi dan visi organisasi tersebut. Selain itu, komitmen juga dilihat dari adanya kesepahaman dari para stakeholders yang ada dalam satu jaringan, dengan demikian tujuan bersama yang diarahkan dalam kolaborasi tersebut akan mudah tercapai.

c) Trust among the participants (adanya saling percaya diantara pelaku/peserta)

Yaitu terjalinnya hubungan profesionalitas saling percaya antara pelaku kepentingan dan stakeholders baik dari segi informasi atau upaya dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama.

d) Governance (kejelasan dalam tata kelola) Kejelasan dalam tata kelola atau governance, meliputi :

- Boundary dan exclusivity, yaitu menegaskan siapa yang termasuk

anggota dan bukan termasuk anggota dalam jaringan/kolaborasi.

- Rules (aturan), yaitu menegaskan sejumlah pembatasan kepada perilaku anggota jika perilaku mereka bertentangan dengan apa yang telah disepakati bersama.
- Self determination, yaitu kebebasan dalam menentukan kolaborasi yang akan dilakukan dan siapa yang terlibat melakukannya.

e) Access to authority (akses terhadap kekuasaan)

Tersedianya standar dan prosedur yang jelas kepada semua anggota. Akses terhadap kekuasaan ini akan mempengaruhi jalannya kolaborasi yang dibangun antar para stakeholders.

f) Distributive accountability/responsibility

Yaitu adanya aturan dalam penataan dan pengeloaan manajemen serta berbagi dalam pembuatan keputusan dengan seluruh anggota jaringan yang terlibat. Demikian hal ini, bahwa dengan adanya pembagian tanggung jawab pencapaian tujuan yang diinginkan mendapatkan hasil yang optimal.

g) Information sharing (berbagi informasi)

Yaitu memberikan kemudahan kepada anggota dalam mengakses, perlindungan privacy mengenai kerahasiaan identitas pribadi seseorang serta adanya keterbatasan akses bagi yang tidak termasuk anggota sepanjang dapat diterima oleh semua pihak.

h) Access to resources (akses sumber daya)

Akses terhadap sumberdaya, yakni adanya ketersediaan sumber keuangan, teknis, manusia dan sumberdaya lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama.

5. Proses Kolaborasi

Proses dari suatu kolaborasi dilakukan dalam beberapa tahapan. Suatu tahapan model kolaborasi menjadi penting untuk diperhatikan sebagai strategi dalam aspek pengelolaan suatu urusan publik. Meskipun proses kolaboratif sulit untuk dilaksanakankarena karakter-karakter dari tiap stakeholder yang berbeda satu dengan yang lainnya sebagai berikut:

a) Face to face dialoge

Semua bentuk collaborative governance dibangun dari dialog tatap muka secara langsung dari tiap stakeholder yang terlibat. Sebagaimana collaborative governance yang berorientasikan proses, dialog secara langsung sangat penting dalam rangka mengidentifikasi peluang dan keuntungan bersama. Dialog secara tatap muka langsung bukanlah semata-mata merupakan negoisasi yang ala kadarnya. Dialog secara langsung ini dapat meminimalisir antagonisme dan disrespect dari antar stakeholder yang terlibat. Sehingga, stakeholder dapat bekerjasama sesuai dengan tujuan dan kebermanfaatan bersama.

b) Trust building

Buruknya rasa percaya antar stakeholder memang merupakan hal yang lumrah di awal proses kolaborasi. Kolaborasi memang bukan semata tentang negoisasi antar stakeholder, namun lebih dari itu merupakan upaya untuk saling membangun kepercayaan satu dengan yang lainnya. Membangun kepercayaan perlu dilakukan sesegera mungkin ketika proses kolaborasi pertama dilakukan. Hal ini diupayakan agar para stakeholder tidak mengalami egosentrisme antar institusi. Oleh karenanya, dalam membangun kepercayaan ini, diperlukan pemimpin yang mampu menyadari akan pentingnya kolaborasi.

c) Commitment to process

Komitmen tentunya memiliki relasi yang kuat dalam proses kolaborasi. Komitmen merupakan motivasi untuk terlibat atau berpartisipasi dalam collaborative governance. Komitmen yang kuat dari setiap stakeholder diperlukan untuk mencegah resiko dari proses kolaborasi. Meskipun komitmen memang merupakan hal yang rumit dalam kolaborasi. Komitmen merupakan tanggung jawab dari stakeholder supaya memandang relasi yang dilakukan sebagai hal yang baru dan tanggungjawab tersebut perlu dikembangkan.

d) Share Understanding

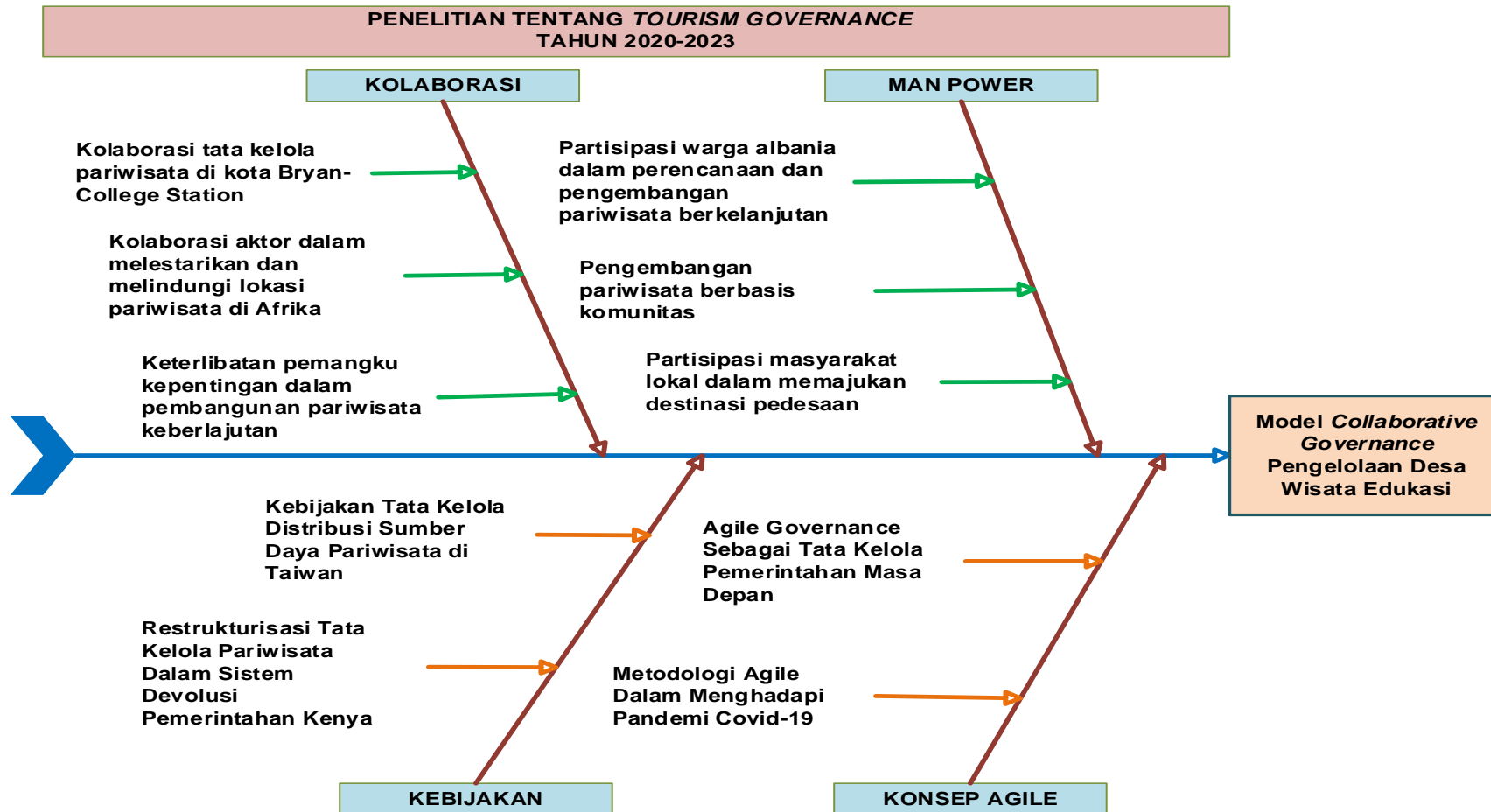
Pada poin yang sama dalam proses kolaborasi, stakeholder yang terlibat harus saling berbagi pemahaman mengenai apa yang dapat mereka (stakeholder) capai melalui kolaborasi yang dilakukan. Saling berbagi pemahaman ini dapat digambarkan sebagai misi bersama, tujuan bersama, obktivitas umum, visi bersama, ideologi yang sama, dan lain- lain. Saling berbagi pemahaman dapat

berimplikasi terhadap kesepakatan bersama untuk memaknai dan mengartikan suatu masalah.

e) Intermediate outcomes

Hasil lanjutan dari proses kolaborasi terwujud dalam bentuk output atau keluaran yang nyata. Hal ini merupakan hasil proses yang kritis dan esensial dalam mengembangkan momentum yang dapat membimbing demi keberhasilan suatu kolaborasi. Intermediate outcomes ini muncul apabila tujuan yang mungkin dan memberikan keuntungan dari kolaborasi yang mana secara relative konkrit dan ketika “small wins” dari suatu kolaborasi dapat dimungkinkan terjadi.

2.3 Kerangka Konsep Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Tipe Riset yang dipakai merupakan tipe riset deskriptif, adalah sesuatu riset yang bermaksud buat melukiskan dengan cara tepat sesuatu individu, kondisi, pertanda ataupun golongan khusus, ataupun buat memastikan gelombang ataupun penyebaran sesuatu pertanda ataupun gelombang terdapatnya ikatan khusus antara sesuatu pertanda dengan penanda lainnya dalam warganya . Ada pula tipe- tipe tata cara dalam riset deskriptif, biasanya memakai 3 tata cara, ialah: tata cara riset permasalahan, tata cara survei, serta tata cara eksperimen. Dalam perihal ini, peneliti memilih tipe tata cara riset permasalahan, dengan estimasi kalau permasalahan yang diobservasi berasal dari gejala serta realitas di lapangan. Pendekatan yang dipakai dalam riset ini yakni pendekatan kualitatif (*qualitative approach*). Opsi pada pendekatan kualitatif sebab riset ini dicoba lewat cara menciptakan, memahami, menerangkan serta mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan desa wisata edukasi di Kabupaten Bojonegoro.

Pemakaian pendekatan kualitatif riset ini, pula didasarkan pada uraian (Lincoln 1985) kalau riset kualitatif ataupun *naturalistic inquiry* merupakan sesuatu metode riset yang dimaksudkan buat memahami bukti, kenyataan sosial, serta anggapan orang yang ada. Merujuk pula pada pemikiran bagi (Nasution, S. 2003) kalau riset kualitatif ataupun riset *naturalistik* dicoba pada suasana fakta dilapangan riset yang bersifat “alami” maupun *natural* begitu juga adanya, tanpa dimanipulasi serta diatur lewat sesuatu eksperimentasi.

Riset *naturalistik* berupaya menyuguhkan peristiwa-peristiwa bagian kehidupan ataupun *slice-of-life* yang didokumentasikan lewat bahasa natural serta menggambarkan sedekat mungkin gimana banyak individu-individu melaporkan apa yang mereka tahu, apa atensi ataupun perhatian, keyakinan, anggapan serta uraian mereka. Begitu juga (Ezzy 2003) menekankan kalau tata cara riset kualitatif untuk pemberian arti (*meanings*) serta pemberian pemahaman

(interpretation) kepada objek yang diobservasi. Jadi riset kualitatif penekanannya terdapat pada pemaknaan objek permasalahan dengan cara spesial. Dalam konteks penelitian ini, proses pemaknaan (*meanings*) dan interpretasi (*interpretation*) dilakukan terhadap konsep *collaborative governance* dalam pengelola desa wisata edukasi di Kabupaten Bojonegoro.

3.2 Lokasi Penelitian

Bahwa metode terbaik yang butuh ditempuh dalam determinasi riset lapangan yakni dengan jalur menjaga filosofi teori, pergilah serta jazakillah lapangan buat memotret apakah ada kesesuaian dengan realitas yang terdapat di lapangan. Keterbatasan geografis serta efisien semacam durasi, biaya, tenaga, butuh pula dijadikan estimasi dalam determinasi posisi riset. Bersumber pada pemikiran tersebut, sehingga penelitian ini dilakukan pada lokus desa pejambon sebagai desa wisata edukasi di Kabupaten Bojonegoro.

3.3 Informan Penelitian

Dalam determinasi informan ataupun narasumber riset, peneliti memakai metode *purposive sampling*, *snowball sampling* dan *accidental sampling*, yang mana *purposive sampling* adalah metode penentuan informan ataupun narasumber memakai estimasi pribadi yang dianggap sesuai/cocok dengan poin riset, peneliti memilih poin serta subjek selaku bagian analisa. Peneliti memilah bagian analisa itu bersumber pada keinginan serta menyangka kalau bagian analisa itu representatif. Ada pula *snowball sampling* adalah salah satu wujud judgment sampling dimana metode pengumpulan informan ataupun narasumber dicoba dengan cara berantai, metode determinasi informan ataupun narasumber yang awal mula jumlahnya kecil hingga setelah itu membengkak dengan cara lalu menembus hingga taraf “redundancy” (ketuntasan ataupun kejenuhan), maksudnya kalau dengan memakai informan ataupun narasumber berikutnya dapat dibilang tidak lagi didapat informasi data tambahan terkini yang berarti. Sedangkan untuk *insidental sampling* merupakan cara pengambilan sampel secara

kebetulan ada atau tersedia di suatu tempat sesuai dengan konteks penelitian (Djam'an Satori dan Aan Komariah 2009).

Adapun dalam teknik *purposive sampling* peneliti menetapkan informan pertama atau *key informan* yaitu Kepala Desa Pejambon. Kemudian peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* yaitu informan yang direkomendasikan oleh *key informan* untuk menambah data dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti yang dilakukan secara berantai sampai dengan taraf "*redundancy*" (ketuntasan ataupun kejenuhan), maksudnya kalau dengan memakai informan ataupun narasumber berikutnya bisa dibilang tidak lagi didapat informasi data tambahan terkini yang berarti. Sedangkan untuk informan dari masyarakat yang berwisata, peneliti menggunakan teknik *insidental sampling*.

3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah face to face dialoge, trust building, commitment to process dan shared understanding dalam pengembangan wisata edukasi di Desa Pejambon, Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro, adapun deskripsi fokus penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Face to face, adalah dialog secara langsung yang dilakukan antara Pemerintah Desa, Dunia Usaha, Universitas, Organisasi Non Pemerintah atau Masyarakat Madani (NGOs), Media Masa dan Masyarakat Terdampak.
- 2) Trust buiding, adalah kepercayaan yang dibangun satu dengan yang lainnya didalam tahap pengelolaan pengembangan wisata edukasi dan diperlukan pemimpin yang mampu menyadari akan pentingnya kolaborasi seperti pemerintah . Misalnya dalam pengembangan obyek wisata edukasi memerlukan bantuan secara moril dan materi, hal ini dapat disediakan oleh pemerintah dalam proses pengembangan desa Wisata.
- 3) Commitment to process, adalah komitmen yang kuat antar pemerintah dengan BUMDEs dan Masyarakat dalam menjaga kawasan wisata yang telah dikembangkan agar tetap aman, nyaman dan tentram.

- 4) Shared understanding, adalah Saling berbagi pemahaman antar pemerintah Desa dengan BUMDEs dan Masyarakat yang dapat digambarkan sebagai misi bersama, tujuan bersama, objektivitas umum, visi bersama, ideologi yang sama.

3.5 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder sebagai berikut:

- 1) Data Primer merupakan informasi yang didapat ataupun digabungkan oleh peneliti dengan cara langsung dari sumber informasinya. Informasi primer diucapkan selaku informasi asli ataupun informasi terkini yang mempunyai kondisi yang up to date. Untuk memperoleh informasi primer, peneliti mengumpulkannya dengan cara langsung.
- 2) Data Sekunder merupakan informasi yang didapat ataupun digabungkan peneliti dari bermacam sumber yang sudah didapat (peneliti selaku tangan kedua). Informasi sekunder bisa didapat dari bermacam sumber semacam, buku, laporan, jurnal, media elektronik, dan lainnya. Dalam kondisi riset ini informasi sekunder beberapa besar didapat dari dokumen-dokumen yang sah dalam pengelolaan Desa Wisata Edukasi.

Teknik pengumpulan informasi yang dilakukan sebagai berikut :

- 1) Observasi (pemantauan) adalah metode pengumpulan informasi dengan metode observasi kepada suatu objek yang diteliti secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi yang wajib dikumpulkan dalam riset. Adapun objek observasi dari riset ini adalah pengelolaan desa wisata edukasi di Desa Pejambon.
- 2) Interview Mendalam (in- depth interview) adalah sesuatu cara memperoleh data untuk kebutuhan riset dengan metode perbincangan antara peneliti selaku wawancara dengan informan ataupun yang berikan data dalam kondisi observasi partisipasi, dimana perbincangan antara peneliti dengan

yang diteliti (informan atau interviewee) berikan opini kalau telah terangkai sesuatu ikatan yang intens antara peneliti dengan informan.

Adapun tata cara interview yang dipakai merupakan interview semi terstruktur, untuk mendapatkan data khusus dari informan baik dengan cara individu orang maupun beregu. Data didapat dengan memakai catatan persoalan yang membidik pada tujuan, dengan metode bertanya langsung pada informan. Dalam Interview semi terstruktur ini pewawancara menanya sesuai pedoman serta digabungkan dengan persoalan yang timbul mendadak pada dikala interview berjalan. Dalam tata cara ini, persoalan bersifat terbuka, alhasil pewawancara bisa mendapatkan informasi atau data tambahan tidak hanya dari catatan persoalan yang terdapat. Isi dari persoalan bisa dicocokkan dengan cara dialog, alhasil tujuan dari persoalan bisa berhasil.

- 3) Studi Dokumen adalah sesuatu metode pengumpulan informasi dari dokumen serta data-data yang dibutuhkan dalam kasus riset kemudian ditelaah dengan cara intens alhasil bisa mensupport serta menaikkan keyakinan serta pembuktian suatu peristiwa.

3.6 Analisis Data

Data yang telah terkumpul (apapun sumber, metode dan alat pengumpulan) selanjutnya perlu diolah dan dianalisis untuk menjawab masalah penelitian. Untuk dapat menjawab masalah, tentu saja data yang didapat perlu diorganisir, sesuai dengan tuntutan penyajian/pengolahan yang akan digunakan. Analisis data bertujuan untuk mencari dan menata data secara sistematis dari hasil rekaman atau catatan wawancara, observasi dan dokumen yang telah dikumpulkan dengan mengadopsi pemikiran analisis data interaktif (Miles, 2014). Analisis data ini meliputi empat alur kegiatan, yaitu 1) proses pengumpulan data melalui berbagai teknik, 2) penyajian data yaitu mengumpulkan data yang telah disunting untuk dianalisis, 3) kondensasi data sebagai bentuk analisis yang mempertajam, memfokuskan, mengurangi dan mengorganisir data. Kondensasi terjadi terus menerus mengacu pada proses pemilihan, penyederhanaan, fokus dari catatan

lapangan, transkrip wawancara, dokumen dan lainnya dengan menjauhi reduksi data, 4) penarikan kesimpulan atau verifikasi yaitu mencari arti, pola, penjelasan atau konfigurasi, serta interpretasi data, untuk dianalisis dan diuji kebenaran serta kecocokannya melalui proses validasi, dengan demikian kesimpulan dapat ditarik dari hal yang khusus ke dalam hal yang umum (induktif).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Data Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dari Aspek yang di kaji dalam Collaborative governance dalam pengembangan desa wisata di Desa Pejambon meliputi 5 fokus Penelitian, yaitu : 1. Face to Face dialoge, 2. Trust Building, 3. Commitment to process, 4. Share Understanding, 5. Intermediate outcomes, dengan mengkaitkan 6 aktor yaitu Pemetintah, Dunia Usaha, Universitas, NGOs (Organisasi non Pemerintah) dan Masyarakat yang terdampak.

a. Face to face dialoge

1) Pemerintah

Pada tahap ini semua bentuk collaborative governance dibangun dari dialog tatap muka secara langsung dari tiap stakeholder yang terlibat. Sebagaimana collaborative governance yang berorientasikan proses, mengidentifikasi peluang dan keuntungan bersama. Dalam pengembangan desa wisata di Desa Pejambon. Dialog permasalahan Anggaran sangat penting untuk dilakukan musyawarah untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam kolaborasi pemerintah dalam pengembangan desa wisata.

“Awal terjadinya desa wisata di Desa Pejambon ketika pemdes pejambon mewakili kecamatan sumberrejo dalam lomba OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP (OGP) dalam keterbukaan anggaran desa di tingkat kabupaten Bojonegoro, dalam lomba tersebut kami meraih juara 1 di tingkat kabupaten, setelah kami menjuarai lomba OGP di tingkat kabupaten kami di minta untuk mewakili lomba keterbukaan public di tingkat provinsijawa timur dan Alhamdulillah kami juga menjuarai lomba tersebut, dan pada akhirnya pemdes pejambon mewakili provinsi jawa timur untuk mengikuti lomba di tingkat nasional, karena memang kami menerapkan keterbukaan anggaran secara terang terangan di dalam pemerintah desa yang mungkin jarang sekali dilakukan oleh pemerintah desa lainya kami pun mendapat juara nasional dalam lomba keterbukaan public. Dari sinilah Desa Pejambon mendapat kepercayaan dari KEMENDES untuk mengembangkan desa kami menjadi desa yang maju yang mampu menghasilkan pendapatan desa yang lebih besar, KEMENDES memberikan bantuan keuangan yang sangat besar, setelah

mendengar kabar gembira tersebut kami lalu mengumpulkan stakeholder dan lembaga desa lainnya untuk membicarakan anggaran tersebut, maka kami berinisiatif untuk membuat desa wisata dengan slogan WEP (WISATA EDUKASI PEJAMBON) dan kami pun membangun WEP dengan keterbukaan anggaran jadi setiap masyarakat bias melihat berapa pun anggaran yang digunakan dalam pembangunan tempat wisata tersebut”.

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh salah satu masyarakat pejambon sebagai berikut:

“awal mula collaborative governance di Desa Pejambon mengikuti perlombaan pada tingkat provinsi tentang desa transparan dalam hal pengelolaan keuangan desa, bisa di akses oleh semua elemen masyarakat Desa Pejambon, dan memperoleh juara provinsi jawa timur dan memperoleh bantuan dari Kemendes untuk pengembangan desa, mengambil konsep desa wisata untuk penggunaan dana bantuan tersebut dalam pengembangan yang berjalan seluruh masyarakat dan kelompok masyarakat dapat mengakses informasi secara transparan melalui website Desa Pejambon dan papan informasi di Desa Pejambon”.

Collaborative governance yang dibangun di Desa Pejambon berdasarkan face to face antara pemangku kepentingan dengan masyarakat setempat atau kelompok masyarakat terdapat keterkaitan saling kerjasama. pengembangan desa wisata dengan tujuan untuk menghasilkan kersajasama maupun kesepakatan mencapai tujuan saling menguntungkan di desa tersebut atas kesepakatan bersama.

2) Dunia Usaha

Pengembangan desa wisata memberikan dampak positif bagi penduduk setempat dalam meningkatkan perekonomian diDesa Pejambon, Seperti yang disampaikan oleh warga setempat yang berjualan disekitaran Desa wisata Sebagai berikut: “dengan berdirinya desa wisata memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar yang berjualan disekitar tempat wisata, memberikan peluang untuk mengembangkan ekonomi mikro untuk masyarakat Pejambon, peluang bekerja semakin berjualan semakin meningkat seiring berkembangnya Desa wisata”.

Pernyataan dari salah satu warga yang memiliki usaha toko sekitar Pejambon menjelaskan bahwa dengan adanya dan berkembangnya desa wisata menambah penghasilan dan kesibukan sebagian masyarakat Pejambon karena semakin

tingginya pengunjung yang datang pada saat hari libur sebelum adanya pandemi, terlihat dari sekitaran tempat wisata yang terdapat banyak kios usaha yang memang dari pihak desa di kususkan untuk masyarakat Pejambon Setempat.

Menurut peneliti Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha sangat berperan dalam mendukung perkembangan desa wisata pejambon karna kerjasama yang mendukung dan memberikan sumbangan positif bagi desa tersebut.

3) Universitas

Praktisi akademisi memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan untuk pengembangan proyek/ kebijakan. Selain praktisi berbasis lokal, ada juga aktor nasional dan internasional yang dapat menyumbangkan pengetahuan dan pengalaman, seperti organisasi penelitian, kelompok pelobi dan advokasi atau konsultan. Anggota kelompok ini sering mengungkapkan pendapat-pendapat yang kuat dan relevan dengan masalah.

Dalam pengembangan desa wisata di Pejambon terdapat pula bagian dari akademisi yaitu mahasiswa KKN UNAIR yang ikut berperan dan terlibat dalam memajukan desa tersebut. Seperti yang diungkapkan Bapak Kepala Desa Pejambon, sebagai berikut:

“kami bersyukur sekali dengan adanya kerjasama antara UNAIR dan Desa Pejambon ini karena telah menempatkan mahasiswa UNAIR di desa kami sehingga sangat membantu kami dalam kegiatan pengembangan Desa Pejambon. Kegiatan mahasiswa tersebut di desa kami antara dalam bidang pendidikan membantu mengajar disekolah; bidang ekonomi, membantu alur neraca keuangan, membantu penyuluhan dan pelatihan yang sesuai bidang mereka, pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai, dan sebagainya. Jadi sangat membantu sekali kerjasama mereka dengan desa kami”

Peran universitas atau akademisi dalam Pelaksanaan pengembangan collaborative governace terdapat keterkaitan namun sebagai evaluasi dan memberikan masukan bagi pemerintah Desa Pejambon setempat sebagai desa terbuka yang mengembangkan desa wisata. Kegiatan KKN tersebut menjadi salah satu upaya dalam membangun desa semakin baik, meskipun demikian diharapkan kegiatan KKN ini akan berlanjut dari tahun ke tahun.

4) NGOs (Organisasi non Pemerintah)

Dalam kesuksesan pengembangan Desa Pejambon tidak berjalan kalau tidak ada kerjasama yang baik antara pemerintah maupun masyarakat dan organisasi untuk saling keterkaitan memajukan wisata setempat seperti yang disampaikan Sekdes Desa Pejambon Sebagai Berikut:

“Organisasi atau masyarakat Pejambon sangat Berpartisipasi dalam menjaga lingkungan Wisata Pejambon masyarakat sekitar yang ramah ketika berinteraksi dengan tamu yang berkunjung di Pejambon Serta budaya yang ramah dalam menghadapi lingkungannya, masyarakat yang harmoni, saling menghargai kepentingan Individu dalam Kelompok.”

Hal ini juga diungkapkan oleh Kepala Desa Pejambon terkait kerjasama dengan pihak NGOs sebagai berikut.

“Kami sebagai perangkat desa memang sangat mengapresiasi keterlibatan masyarakat dalam membantu pengembangan Desa Pejambon ini. Selain itu ada pihak NGOs yang juga terlibat disini yaitu KUEMdes dan OFFTAKERS. KUEMdes ini nantinya dapat menampung hasil Home Industry dan pemasarannya, yang dalam hal ini TPKK bekerjasama dengan “KUB. SARANA MANDIRI SEJAHTERA” sedangkan OFFTAKERS ini merupakan biro traveling yang diharapkan menjadi marketing wisata edukasi Pejambon, yang dalam hali ini TPKK bekerjasama dengan PO. GALANG TRANS Desa Wotan kecamatan Sumberrejo. Desa Pejambon Tanpa adanya kerjasama dengak kedua pihak tersebut mungkin desa Wisata Pejambon belum bisa sebaik seperti saat ini.

Dari keterangan diatas dapat peneliti katakan masyarakat Desa Pejambon memiliki kepedulian dan social yang tinggi dalam terhadap adanya Desa Pejambon. Terlihat dari keramahan dalam menyambut pengunjung maupun tamu yang dating di Desa Pejambon ketika ada even di desa. Keterlibatan Organisasi non pemerintah dalam collaborative governance dalam pengembangan desa wisata cukup tampak, terutama dukungan warga maupun kelompok organisasi non pemerintah dalam proses pengembangan desa wisata yang sudah dibekali dengan tugas penanganan wisata dan perawatannya.

5) Media Masa

Media masa yang memiliki peran dalam penyebaran informasi dalam proses collaborative Governance dalam pengembangan desa wisata informasi yang dapat diakses masyarakat Desa Pejambon dan luar desa Menjadikan Pejambon menjadi desa yang memang sangat dibanggakan masyarakat setempat, seperti yang disampaikan oleh bapak sekretaris Desa Pejambon sebagai berikut:

Dengan adanya media informasi WEB Desa Pejambon diharapkan dapat memberikan kepercayaan masyarakat tentang keterbukaan pengelolaan desa memberikan informasi yang nantinya timbul kepercayaan masyarakat desa terhadap pemerintah Desa Pejambon.

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Bapak Abd Rohman Selaku kepala Desa Pejambon: “Web Desa Pejambon yang telah ada nantinya bisa dimanfaatkan untuk menunjukkan hasil monitoring dan memberikan pemahaman public mengenai pengembangan Desa Pejambon nantinya juga bisa mengenalkan ke public luas mengenai potensi Desa Pejambon dan icon desa yang diminati masyarakat luas untuk dikunjungi warga luar desa”.

Dari pernyataan tersebut dapat peneliti katakan bahwa peran media sangat penting untuk menyebarkan informasi kemasyarakat luas mengenai potensi desa. Media dalam hal ini adalah media online web Desa Pejambon dalam media publikasi desa.

b. Trust building

1) Pemerintah

Kepercayaan merupakan komponen penting dalam menjalankan sebuah proyek antar stakeholder yang memiliki wewenang terhadap suatu tujuan yang ingin dicapai bersama. Mengelola kepercayaan diperlukan praktek secara nyata dan trust building merupakan jenis strategi manajemen karena secara kuat tidak hanya terfokus pada tujuan saat ini melainkan juga kerjasama yang akan datang.

Buruknya rasa percaya antar stakeholder memang merupakan hal yang lumrah di awal proses kolaborasi. Kolaborasi memang bukan semata tentang negoisasi antar stakeholder, namun lebih dari itu merupakan upaya untuk saling membangun kepercayaan satu dengan yang lainnya. Dalam melaksanakan proses

Collaborative Governace Kepercayaan antar pemerintah desa dengan Ketua BUMDes juga harus dibangun begitu sesama masyarakat untuk memperoleh hasil kerjasama dalam pengembangan yang lebih maju, seperti yang disampaikan oleh bapak kepala Desa Pejambon sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan pengembangan desa wisata hal terpenting untuk mencapai hasil yang maksimal dan mengalami kemajuan yang cepat harus ada kepercayaan dalam pengelolaan keuangan, saling percaya dengan rekan yang lain mengurangi sikap saling curiga.

Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh warga pejambon yang berada di tempat wisata sebagai berikut: “DiDesa Pejambon dalam pelaksanaan pengembangan tempat wisata selalu menerapkan keterbukaan dalam anggaran pengembangan semua itu dapat diakses oleh semua masyarakat Pejambon, sehingga Pejambon menjadi desa yang memiliki kerjasama yang bagus bersama masyarakat dalam mengembangkan wisata di tingkat desa.”

Dapat dikatakan bahwa Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pejambon dapat diakses oleh semua elemen Masyarakat melalui website desa yang menyajikan informasi secara terbuka <http://pejambon.desa.id> seperti contoh data Anggaran Sebagi sebagai berikut.

Dalam pengembangan desa wisata yang berbasis Edukasi tidak bisa berjalan sendiri, diperlukan adanya kolaborasi antara BUMDes masyarakat dan pemerintah desa. Proses kolaborasi ini memiliki beberapa tahapan.

- a. Perjanjian kerjasama antar BUMDes dengan pemerintah Desa
- b. Pembangunan Desa wisata edukasi
- c. Pendampingan dalam operasional dalam pembangunan desa wisata
- d. Operasional desa wisata oleh BUMDes

Kerjasama yang dilakukan pertama kali dengan permintaan dengan pemerintah desa yang mau membangun desa wisata edukasi, sebelum rancangan pembangunan desa wisata edukasi pemerintah desa memperoleh penghargaan dari Pemerintah Jawa Timur sebagai desa percontohan dengan model desa yang transparan dalam hal keuangan desa, pencapaian tersebut membuat pemerintah desa terus untuk berinovasi kedepan sebagai desa yang dipercayai sebagai

percontohan untuk desa lain. Diperkuat dengan pernyataan Kepala Desa setempat, seperti hasil wawancara yang dilakukan bersama Kepala Desa Pejambon Sebagai berikut: “awal mula collaborative governance di Desa Pejambon mengikuti perlombaan pada tingkat provinsi tentang desa transparan dalam hal pengelolaan keuangan desa, bisa di akses oleh semua elemen masyarakat Desa Pejambon, dan Alhamdulillah memperoleh juara provinsi jawa timur, memperoleh bantuan dari Kemendes untuk pengembangan desa, mengambil konsep desa wisata untuk penggunaan dana bantuan tersebut dalam pengembangan yang berjalan seluruh masyarakat dan kelompok masyarakat dapat mengakses informasi secara transparan melalui website desa dan papan informasi di Desa Pejambon”.

Dari hasil penelitian di atas menunjukkan collaborative governance dalam membangun sebuah trust building telah dilakukan antara pemangku kepentingan dengan masyarakat setempat dengan adanya keterbukaan dalam anggaran pengembangan maupun informasi terkait yang dapat diakses oleh semua masyarakat di Desa Pejambon, sehingga Pejambon menjadi desa yang memiliki kerjasama yang bagus bersama masyarakat dalam mengembangkan wisata di tingkat desa yang dilandasi rasa saling percaya satu sama lain untuk mencapai hasil yang maksimal terhadap pengembangan wisata edukasi di Desa Pejambon.

2) Dunia usaha

Dengan adanya sebuah ide/ gagasan, kebijakan yang telah terealisasi oleh para stakeholder untuk mengembangkan desa wisata di Desa Pejambon memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat terutama masyarakat di Desa Pejambon. Hal ini dikarenakan masyarakat dapat meningkatkan perekonomian mereka dengan bekerjasama dan diberikan kepercayaan berjualan di wilayah wisata edukasi Desa Pejambon.

Seperti yang disampaikan oleh warga setempat yang berjualan disekitaran Desa wisata Sebagai berikut:

“dengan berdirinya desa wisata memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar yang berjualan disekitar tempat wisata, memberikan peluang untuk mengembangkan ekonomi mikro untuk masyarakat Pejambon, peluang

bekerja semakin berjulan semakin meningkat seiring berkembangnya Desa wisata.”

Dari pernyataan tersebut menunjukkan adanya sebuah kepercayaan pemangku kepentingan untuk memberikan kesempatan masyarakat menambah penghasilan dengan cara berjulan di sekitar desa wisata Pejambon tersebut. Oleh karena itu, trust building dalam collaborative governance berperan penting untuk mengembangkan desa wisata Pejambon. Trust building harus dijadikan target yang harus dicapai antara pemerintah dan dunia usaha.

3) Universitas

Peran universitas/ akademisi dalam pelaksanaan pengembangan desa wisata edukasi adalah sebagai pemantau dan evaluasi melalui penelitian seperti yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Collaborative governance antara peneliti dan pemangku kebijakan terkait diberikan kepercayaan, dan kesempatan untuk memperoleh informasi dan gambaran mengenai pengembangan desa wisata edukasi di Pejambon.

Hal ini dapat terlihat dari keterlibatan mahasiswa KKN dari Universitas Airlangga yang diberikan kepercayaan dalam mengembangkan desa wisata edukasi Pejambon tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak KADES, sebagai berikut: “Kalau untuk pihak perangkat desa pastinya memberikan kepercayaan terhadap mahasiswa KKN, karena mahasiswa tersebut pastinya dengan sukarela, semangat, dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepada mereka, apalagi mereka sudah mendapatkan bekal dari kampus. Inovasi baru dan pemikiran pemikiran mereka akan jadi masukan buat kami”.

Dari pernyataan tersebut, pemangku kepentingan telah memberikan kepercayaan kepada pihak universitas untuk terlibat dalam pengembangan Desa Pejambon. Hal ini tentunya akan berdampak baik antara kedua belah pihak, baik itu universitas maupun pihak Desa Pejambon itu sendiri.

4) NGOs (Organisasi non Pemerintah)

Organisasi atau masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam menjaga budaya, dan ramah dalam menghadapi lingkungannya, saling menghargai, serta sukarela memberikan kontribusi merupakan hal penting dalam sebuah kerjasama

organisasi. Tanpa adanya sebuah kepercayaan dari organisasi atau masyarakat tidak akan mungkin sebuah proyek akan berhasil. Karena sebuah kepercayaan merupakan awal dari terwujudnya sebuah kerjasama yang baik.

Dalam pengembangan desa wisata edukasi Pejambon tidak terlepas dari peran penting organisasi non pemerintah (masyarakat). seperti yang disampaikan Sekdes Desa Pejambon Sebagai Berikut: “Organisasi atau masyarakat Pejambon sangat Berpartisipasi dalam menjaga lingkungan Wisata Pejambon masyarakat sekitar yang ramah ketika berinteraksi dengan tamu yang berkunjung di Pejambon Serta budaya yang ramah dalam menghadapi lingkungannya, masyarakat yang harmoni, saling menghargai kepentingan Individu dalam Kelompok.”

Selain pernyataan di atas, Desa Pejambon juga bekerjasama dengan KUEMDes dan OFFTAKER. Tentunya kerjasama tersebut tidak luput dari kepercayaan pihak stakeholder dalam pengembangan Desa Pejambon. Hal ini diungkapkan oleh KADES Pejambon sebagai berikut:

“Kami memberikan kepercayaan kepada sejumlah pihak dalam pengembangan Desa Pejambon ini. Kepercayaan tersebut diharapkan akan memberikan manfaat kepada desa dan masyarakat tentunya. Dengan kerjasama dengan KUEMDes membantu masyarakat di Desa Pejambon untuk menampung hasil Home Industry dan memasarkan kepada masyarakat luas”.

Berdasarkan pernyataan di atas membangun sebuah kepercayaan dalam collaborative governance antara pemangku kepentingan dengan masyarakat penting. Hal ini ditunjukkan dari dampak positif masyarakat pejambon yang sangat berpartisipasi dalam menjaga lingkungan wisata Pejambon. Bahkan mereka dengan ramah saat berinteraksi dengan pengunjung dan masyarakat sekitarnya tentunya ini tidak terlepas dari keterbukaan, kepercayaan dan sikap integritas antara pemangku kepentingan dengan organisasi non pemerintah.

5) Media massa

Media massa menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat saat ini. Media massa memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dalam banyak hal. Dalam proses collaborative governance pengembangan dese wisata

edukasi Pejambon, media massa menjadi salah satu alat pemangku kepentingan maupun masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai wisata edukasi di Desa Pejambon. Bahkan informasi tersebut dapat di akses melalui web yang tersedia di desa tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh pengurus BUMDes sebagai berikut. “Kami selaku pengurus BUMDes terus menerus mempromosikan Wisata Edukasi Pejambon ini baik memalui media elektronik (WA, Facebook, DLL) selain juga melalui media elektronik kami dan juga mempromosikan langsung dari mulut ke mulut, tentunya kami juga terus berinovasi untuk bisa memberikan pembaruan terhadap wahana wahana yang ada dalam Wisata Edukasi Pejambon ini”.

Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh warga pejambon yang berada di tempat wisata sebagai berikut: “Desa Pejambon dalam pelaksanaan pengembangan tempat wisata selalu menerapkan keterbukaan dalam anggaran pengembangan semua itu dapat diakses oleh semua masyarakat Pejambon, sehingga Pejambon menjadi desa yang memiliki kerjasama yang bagus bersama masyarakat dalam mengembangkan wisata di tingkat desa”.

Dari pernyataan tersebut, media massa memiliki peran penting dalam mengenalkan wisata edukasi Pejambon ke masyarakat luas. Tentunya inovasi yang diharapkan masyarakat dengan wisata tersebut adalah adanya keterbukaan dan kepercayaan untuk menjadikan wisata edukasi tersebut lebih berkembang, dan menjadi kebanggaan masyarakat luas.

c. Commitment to process

1) Pemerintah

Komitmen tentunya memiliki relasi yang kuat dalam proses kolaborasi. Komitmen merupakan motivasi untuk terlibat atau berpartisipasi dalam collaborative governance. Komitmen yang kuat dari setiap stakeholder diperlukan untuk mencegah resiko dari proses kolaborasi. Berikut wawancara dengan ketua BUMDes Pejambon: “Menurut saya komitmen yang dibangun pemerintah desa dengan masyarakat adalah kolaborasi yang bagus untuk sama - sama saling membangun mengembangkan potensi Desa Pejambon guna sama - sama memajukan desa, dengan adanya musyawarah penggunaan anggaran desa”

Sebagai pelengkap data, penulis juga mengumpulkan pendapat dari beberapa informan lainnya. Pendapat lain yang dikemukakan oleh Kepala Desa Pejambon kecamatan Sumberrejo adalah sebagai berikut: “awal mula collaborative gvernance di Desa Pejambon mengikuti perlombaan pada tingkat provinsi tentang desa transparan dalam hal pengelolaan keuangan desa, bisa diakses oleh semua elemen masyarakat Desa Pejambon, dan memperoleh juara provinsi jawa timur dan memperoleh bantuan dari Kemendes untuk pengembangan desa, mengambil konsep desa wisata untuk penggunaan dana bantuan tersebut dalam pengembangan yang berjalan seluruh masyarakat dan kelompok masyarakat dapat mengakses informasi secara transparan melalui website Desa Pejambon dan papan informasi diDesa Pejambon.”

Dari pernyataan diatas dapat dikatakan proses collaborative governace dalam pengembangan desa wisata memiliki kolaborasi yang bagus relasi yang terbentuk diDesa Pejambon dalam proses pengembangan memiliki prinsip kerjasama yang kuat dan saling mengembangkan dalam perencanaan pembentukan dengan anggaran yang telah disediakan oleh pemdes setempat. “pengelolaan keuangan BUMDes dilakukan secara terbuka (governance) sesuai arahan dari Bapak Kepala Desa bahwa Desa Pejambon harus menjadi contoh bagi desa yang lain dalam pengelolaan keuangan baik dari dalam BUMDes maupun Keuangan Desa, untuk pembagian Hasil nya kami menerapkan 80% untuk operasional BUMDes dan 20% untuk Desa”.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Pemdes Desa Pejambon Sebagai Berikut: “...kami dalam melakukan kerjasama dalam pengelolaan desa wisata edukasi Pejambon berkomitmen pada aturan yang telah disepakati bersama BUMDes/Tokoh yang terlibat yang dituangkan dalam Peraturan Desa maupun Surat Keputusan Kepala Desa Pejambon.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa komitmen dalam pengelolaan wisata edukasi Pejambon berpatokan dari SK yang dibuat Pemdes dan telah melaksanakan komitmen sesuai tugasnya dan kolaborasi pemerintah yang bagus.

2) Dunia Usaha

Pengembangan desa wisata di Pejambon selalu berinteraksi secara sinergi. Hal ini dilakukan untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Hal ini terlihat ketika peneliti melakukan observasi di Pejambon BUMDes yang sudah dibentuk oleh Kepala Desa yaitu, 1. Bidang Wisata Edukasi Pejambon, 2. Bidang Lumbung Pangan, 3. Bidang jasa.

Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh ketua BUMDes yang berada di tempat wisata sebagai berikut: “wisata edukasi yang terbentuk dan berkembang di Desa Pejambon memberikan pemasukan tambahan bagi kas desa, pendapat dari objek wisata yang memiliki lebih dari 2 wahana edukasi ATV, flying fox, taman Bestarti serta Kolam renang dan Musium pertanian, masing-masing wahana di Pejambon berbayar dan hasil wisata sebagian masuk pada kas pemerintah desa.”

Dari pernyataan di atas, peneliti mengungkapkan bahwa komitmen dalam dunia kerja itu penting dan diperlukan. Komitmen merupakan sebuah motivasi untuk terlibat atau berpartisipasi dalam collaborative governance. Komitmen adalah tanggung jawab dari stakeholder supaya memandang relasi kerja sebagai hal baru dan perlu di kembangkan. Begitu pula dalam collaborative governance dalam pengembangan di desa wisata edukasi Pejambon, peneliti melihat adanya komitmen yang baik, terbuka, dan tanggungjawab antara pemangku kebijakan dengan dunia kerja atau lapangan kerja yang tersedia di wisata tersebut.

3) Universitas

Komitmen merupakan sebuah cara untuk mempertahankan sebuah hubungan baik itu hubungan antar individu/ kelompok. Desa Pejambon juga berkomitmen bersama dengan pihak universitas untuk selalu memberikan yang terbaik untuk desa, baik itu berupa pemikiran maupun tindakan yang membangun. Sebagai salah satu komitmen universitas membantu masyarakat Desa Pejambon dalam program “Gemar Berseri Desa Pejambon Peduli Lingkungan”. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Sekdes Pejambon sebagai berikut: “kami bersama-sama berkomitmen untuk menjaga lingkungan di Desa Pejambon. Mahasiswa KKN

juga ikut berpartisipasi disana, bahkan yang membuat inovasi “Gemar Berseri” itu mereka.

Dari pernyataan di atas, Pelaksanaan pengembangan collaborative governance terdapat keterkaitan kerjasama Desa Pejambon dengan akademisi maupun Universitas. Hal ini terlihat dari kolaborasi program “Gemar Berseri” Desa Pejambon.

4) NGOs (Organisasi non Pemerintah)

Dalam sebuah kerjasama untuk mencapai tujuan/ keberhasilan bersama diperlukan sebuah komitmen. Komitmen merupakan sebuah tanggungjawab dari stakeholder untuk mencegah resiko dari proses kolaborasi bersama pemangku kebijakan ataupun masyarakat.

Dalam proses collaborative governance pengembangan desa wisata edukasi di Pejambon, pemangku pemerintah terus mengupayakan komitmen untuk terbuka untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam mengembangkan desa wisata edukasi di Pejambon. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Desa Pejambon, sebagai berikut: “konsep yang diterapkan di Desa Pejambon adalah pemerintahan yang transparan bagi semua orang, masyarakat dan kelompok masyarakat setempat kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah setempat dalam hal pengembangan desa dan pengambilan keputusan”.

Dari pernyataan di atas, peneliti berpendapat bahwa, komitmen sudah di terapkan dalam kerjasama pemangku kebijakan dan organisasi atau masyarakat dalam pengembangan desa wisata edukasi di Pejambon. Hal ini tentu harus di tingkatkan demi keberhasilan dan dalam pengambilan keputusan setiap kebijakan.

5) Media massa

Media massa berperan penting dalam pengembangan wisata edukasi di Pejambon dan diharapkan dapat membantu memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai wisata edukasi tersebut. Hal ini diungkapkan oleh pengurus BUMDes sebagai berikut: “Kami selaku pengurus BUMDes terus menerus mempromosikan Wisata Edukasi Pejambon ini baik memlaui media elektronik (WA, Facebook, DLL) selain juga melalui media elektronik kami juga mempromosikan lewat brosur dan juga mempromosikan langsung dari mulut ke

mulut, tentunya kami juga terus berinovasi untuk bisa memberikan pembaruan terhadap wahana wahana yang ada dalam Wisata Edukasi Pejambon ini”

Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh warga pejambon yang berada di tempat wisata sebagai berikut: “Desa Pejambon dalam pelaksanaan pengembangan tempat wisata selalu menerapkan keterbukaan dalam anggaran pengembangan semua itu dapat diakses oleh semua masyarakat Pejambon, sehingga Pejambon menjadi desa yang memiliki kerjasama yang bagus bersama masyarakat dalam mengembangkan wisata di tingkat desa.”

Dari pernyataan di atas, peneliti berpendapat bahwa untuk memajukan wisata edukasi di Pejambon di perlukan media masa untuk memperkenalkan wisata tersebut ke khalayak umum. Serta diperlukan sebuah komitmen bersama antara pemangku kebijakan dengan pihak lain agar terus bersinergi, berperan aktif, menjaga kepercayaan, keterbukaan, serta memberikan yang terbaik untuk masyarakat luas.

d. Share Understanding

1) Pemerintah

Pada poin yang sama dalam proses kolaborasi, stakeholder yang terlibat harus saling berbagi pemahaman mengenai apa yang dapat mereka (stakeholder) capai melalui kolaborasi yang dilakukan. Saling berbagi pemahaman ini dapat digambarkan sebagai misi bersama, tujuan bersama, objektivitas umum, visi bersama, ideologi yang sama, dan lain-lain. saling berbagi pemahaman dapat berimplikasi terhadap kesepakatan bersama untuk memaknai dan mengartikan suatu masalah. Seperti yang dikatakan oleh ketua BUMDes Pejambon sebagai berikut:

“Sebelum proses pengembangan desa wisata semua elemen masyarakat dan pemerintah desa selalu mengadakan rapat koordinasi dalam penggunaan anggaran desa maupun anggaran pembinaan dari Kemendes, saling bertukar fikiran pendapat, gagasan maupaun ide guna untuk memajukan Desa Pejambon.”

Melihat pernyataan tersebut proses share understanding kepala desa sering sharing bertukar pikiran guna memajukan desa pernyataan tersebut juga diperkuat oleh bapak sekdes Desa Pejambon sebagai berikut: “Setelah Desa Pejambon

memperoleh penghargaan dari kemendes pemerintah desa dengan tokoh masyarakat dan BUMDes saling berkordinasi untuk mengolah amggaran dari kemendes untuk memajukan Desa Pejambon salah satunya rapat pada saat rapat dians di desa maupun diluar dinas untuk menyatukan visi dan tujuan bersama.”

2) Dunia Usaha

Dalam proses collaboration governance pengembangan desa wisata edukasi Pejambon selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kemajuan dan keberhasilan Desa Pejambon. Tidak heran pemangku kepentingan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam memajukan wisata edukasi tersebut dengan membuka lapangan pekerjaan dan sebagian ada yang berjualan di sekitar wisata edukasi tersebut. Hal ini diungkapkan oleh kepala Desa Pejambon, sebagai berikut: “Ekonomi Kreatif diDesa Pejambon mulai dikembangkan seperti Pemanfaatan limbah kain menjadi keset, Pengolahan limbah kain menjadi keset lantai, merupakan kegiatan sebagian warga Desa yang telah lama ditekuni dan dijadikan home industry di Desa Pejambon, Selain kesen juga pengembangan home industry susu kedele serta pengelolaan tahu dan tempe, dan Batik Pejambon.”

Pernyataan kepala desa tersebut didukung oleh pendapat masyarakat sekitar, sebagai berikut: “dengan berdirinya desa wisata memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar yang berjualan di sekitar tempat wisata, memberikan peluang untuk mengembangkan ekonomi mikro untuk masyarakat Pejambon, peluang bekerja semakin berjualan semakin meningkat seiring berkembangnya Desa wisata.”

Dari keterangan di atas, peneliti mengungkapkan masyarakat Desa Pejambon sangat terbantu dengan adanya kesempatan berpartisipasi. Dan pemangku kebijakan berhasil melaksanakan kegiatan tersebut karena dampaknya bermanfaat untuk masyarakat menambah penghasilan. Pada hakikatnya Proses share understanding kepala desa yang sering sharing bertukar pikiran sangat di perlukan untuk memajukan Desa Pejambon.

3) Universitas

Pelaksanaan pengembangan collaborative di desa wisata Pejambon terdapat kerlibatan pihak Universitas UNAIR. Pihak stakeholder tersebut berbagi pemahaman dalam segala hal yaitu pendidikan, ekonomi. Hal ini diungkapkan oleh sekdes Desa Pejambon sebagai berikut: “Kedatangan mahasiswa KKN sangat membantu kami dalam alur pengelolaan neraca keuangan, maklum perangkat desa kami ada yang belum paham detailnya jadi mereka ngebantu sekali. Selain itu mereka juga membantu dalam digital marketing desa wisata Pejambon. Mahasiswa sekarang kan pintar teknologi, sedangkan kami yang tua tua ini gptek. Jadi mereka yang bantu desain web dan segala yang berkaitan dengan digital marketing wisata edukasi di Desa Pejambon”.

4) NGOs (Organisasi non pemerintah)

Kepercayaan yang dibangun satu dengan yang lainnya didalam tahap pengelolaan pengembangan wisata edukasi dan diperlukan pemimpin yang mampu menyadari akan pentingnya kolaborasi seperti pemerintah. Misalnya dalam pengembangan obyek wisata edukasi memerlukan bantuan secara moril dan materi, hal ini dapat disediakan oleh pemerintah dalam proses pengembangan desa Wisata tersebut harusnya dapat melibatkan organisasi non pemerintah seperti masyarakat atau pihak swasta.

Desa Pejambon juga berkolaborasi dengan sejumlah pihak. Seperti yang diungkapkan Sekdes Desa Pejambon sebagai berikut: “kami membangun kepercayaan dengan sejumlah pihak dalam mengembangkan Desa Pejambon, yaitu KUEMDes dan OFFTAKER. Alhamdulillah kepercayaan tersebut sampai sekarang masih ada, dan kerjasama semua pihak juga baik, kolaborasi baik dan pengembangan desa wisata juga semakin berkembang.

Dari pernyataan diatas, peneliti mengungkapkan bahwa sebuah kepercayaan yang di bangun dengan kuat akan memperpanjang keberlangsungan kerjasama antar kedua belah pihak. Hal ini terbukti dari kerjasama pihak desa dengan KUEMDes dan OFFTAKER yang masih tetap ada sampai saat ini.

5) Media massa

Media masa merupakan sarana atau alat untuk mendapatkan informasi secara mudah dan cepat. Media massa juga berperan mengantarkan sebuah informasi untuk pengambilan keputusan bagi beberapa pihak. Dalam proses collaborative governance pengembangan desa wisata media massa juga dimanfaatkan untuk mempromosikan wisata edukasi tersebut ke berbagai masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh pengurus BUMDes sebagai berikut:

“Kami selaku pengurus BUMDes terus menerus mempromosikan Wisata Edukasi Pejambon ini baik melalui media elektronik (WA, Facebook, DLL) selain juga melalui media elektronik kami juga mempromosikan langsung dari mulut ke mulut, tentunya kami juga terus berinovasi untuk bisa memberikan pembaruan terhadap wahana wahana yang ada dalam Wisata Edukasi Pejambon ini.”

Pernyataan ini diperkuat oleh salah satu warga Desa Pejambon, sebagai berikut : “Di wisata edukasi Desa Pejambon ini sudah tersedia web. Web tersebut berisi informasi Desa Pejambon, keterbukaan pengelola anggaran, beragam edukasi dan wahana wahana juga. Jadi kita lebih gampang untuk melihat informasinya”.

Dari pernyataan di atas, peneliti mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut merupakan upaya yang baik dalam memanfaatkan media massa untuk mempromosikan wisata edukasi melalui media elektronik maupun non elektronik yang tujuannya sama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa desa wisata edukasi ini perlu untuk menjadi sebuah edukasi yang bermanfaat karena ada usaha mikro masyarakat Pejambon atau bahkan sekedar menikmati wahana wahana yang tersedia untuk sarana rekreasi bersama keluarga.

e. Intermediate outcomes

Lanjutan dari proses kolaborasi terwujud dalam bentuk output atau keluaran yang nyata. Hal ini merupakan hasil proses yang kritis dan esensial dalam mengembangkan momentum yang dapat membimbing demi keberhasilan suatu kolaborasi. Intermediate outcomes ini muncul apabila tujuan yang mungkin dan

memberikan keuntungan dari kolaborasi yang mana secara relative konkrit dan ketika “small wins” dari suatu kolaborasi dapat dimungkinkan terjadi.

1) Pemerintah

Pemerintah merupakan pemangku kepentingan yang memiliki peran terbesar dalam Pengembangan desa wisata di Pejambon Pemerintah menjadi aktor pertamayang didukung oleh para pemangku kepentingan dalam proses pengembangan collaborative governance dalam pengembangan desa wisata di Pejambon.

Seperti yang telah dilaksanakan collaborative governance pada pengembangan desa wisata di Pejambon sebagai berikut: Dengan adanya kerjasama dan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran di Desa Pejambon, Desa Pejambon menjadi desa percontohan dalam hal pengelolaan keuangan mulai dari DD dan ADD yang semua dapat diakses oleh semua masyarakat pejambon.

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh bapak Sekdes Desa Pejambon yang mengungkapkan sebagai berikut: “Dengan berkembangnya desa wisata ini wujud dari keterbukaan pengelolaan anggaran desa maupun uang pembinaan Desa Pejambon dan kepercayaan yang terbentuk antara masyarakat dengan pemerintah desa dalam mengembangkan dan menjaga desa wisata di pejambon yang pertama di Kecamatan Sumberrejo.”

2) Dunia Usaha

Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa Desa Pejambon memiliki output yang sangat maju dan berkembang dapat diperhatikan dari collaborative governance yang berlaku pada desa tersebut, dengan adanya proses kolaborasi memberikan hasil tambahan kas desa dari tempat wisata di Desa Pejambon seperti yang disampaikan oleh ketua BUMDes pejambon sebagai berikut: “Wisata edukasi yang terbentuk dan berkembang di Desa Pejambon memberikan pemasukan tambahan bagi kas desa, pendapat dari objek wisata yang memiliki lebih dari 2 wahana edukasi ATV, flying fox, taman Bestarti serta Kolam renang dan Musium pertanian, masing- masing wahana dipejambon berbayar dan hasil wisata sebagian masuk pada kas pemerintah desa.” Disamping wisata yang berkembang Dunia Usaha yang berkembang di Desa Pejambon juga mengalami

kemajuan Seperti yang disampaikan oleh Salah satu Warga sebagai Berikut: “Ekonomi Kreatif diDesa Pejambon mulai dikembangkan seperti Pemanfaatan limbah kain menjadi keset, Pengolahan limbah kain menjadi keset lantai, merupakan kegiatan sebagian warga Desa yang telah lama ditekuni dan dijadikan home industry di Desa Pejambon, Selain keset juga pengembangan home industry susu kedele serta pengelolaan tahu dan tempe, dan Batik Pejambon.”

Dapat dikatakan kolaborasi yang berkembang di pemerintahan Desa Pejambon tidak lepas dari kolaborasi pemerintah dengan masyarakat setempat untuk menjadikan Desa Pejambon lebih maju dari sebelumnya, pengembangan desa wisata memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sekitar selain memajukan perkonomian desa juga memberikan lapangan pekerjaan bagi sebagian masyarakat Desa Pejambon.

3) Universitas

Peran Universitas dalam proses collaborative Governance dalam pengembangan Desa Pejambondapat terlihat dari hasil yang telah dicapai setelah adanya kolaborasi atau kerjasama antara pihak pemangku kepentingan dan Mahasiswa KKN di Desa Pejambon. Hasil yang telah dicapai tersebut adalah semakin baiknya neraca keuangan Desa Pejambon, berkembangnya digitalisasi marketing dalam memperkenalkan desa wisata Pejambon ke seluruh masyarakat lokal, terlaksananya pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana yang saat ini sudah memadai untuk digunakan dan dimanfaatkan oleh warga setempat, terealisasinya kegiatan penyuluhan dan pelatihan bagi warga (kesehatan, pendidikan, ekonomi kreatif), dan program “Gemar Berseri” Desa Pejambon yang terlaksana dengan baik dan melibatkan sebagian besar warga Desa Pejambon.

Seperti yang ungkapkan oleh bapak Ketua BUMDes Bpk Andi Wimratani sebagai berikut: “ketika kami memutuskan untuk bekerjasama dengan pihak UNAIR kami berharap kerjasama ini membuahkan hasil yang baik untuk pengembangan desa wisata Pejambon. Dan alhasil semuanya berjalan sesuai dengan yang di harapkan, ada kemajuan sedikit demi sedikit outcome-nya dan hal itu membuat kami bangga.

Pernyataan ini diperkuat oleh Bapak Sekdes yang mengungkapkan sebagai berikut: “Hasil kerjasama antara pihak kami dan UNAIR yaitu semakin baiknya neraca keuangan Desa Pejambon, berkembangnya digitalisasi marketing dalam memperkenalkan desa wisata Pejambon ke seluruh masyarakat lokal, terlaksananya pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana yang saat ini sudah memadai untuk digunakan dan dimanfaatkan oleh warga setempat, terealisasinya kegiatan penyuluhan dan pelatihan bagi warga (kesehatan, pendidikan, ekonomi kreatif), dan program “Gemar Berseri” Desa Pejambon yang terlaksana dengan baik dan melibatkan sebagian besar warga Desa Pejambon. Tentunya kami berharap perkembangan outcome ini akan berjalan lebih baik lagi ke depannya.

Intermediate outcome merupakan sebuah hasil dari kegiatan usaha yang dapat diidentifikasi dan diukur dalam waktu dekat, dan menjadi indikator dalam jangka panjang pengembangan desa wisata Pejambon. Hasil saat ini merupakan small final dan tentunya kami berusaha untuk mendapatkan intermediate outcome untuk menuju final outcomes.

4) NGOs (Organisasi non Pemerintah)

Organisasinon-pemerintah (NGOs) yang terlibat dalam Collaborative Governanceterlihat dari karang taruna desa dan tokoh masyarakat desa seperti yang dikatakan oleh bumdes Desa Pejambon sebagai berikut:

“ketika melaksanakan kegiatan desa atau even dipejambon pihak pemerintah desa selalu melibatkan kelompok karang taurna dan masyarakat desa dalam melancarkan kegiatan yang ada, untuk saling meringankan tugas pemerintah dan organisasi lainnya yang memiliki kepedulian pengembangan wisata.”

Selain keterlibatan masyarakat dan karang taruna Desa Pejambon, Pemerintah desa juga bekerjasama dengan pihak NGOs lainnya, yaitu KUEMDes dan OFFTAKER. Hal ini diungkapkan oleh bapak Kades sebagai berikut.

“Hasil kerjasama kami dengan KUEMDes berupa home industri di bidang makanan yaitu (oleh oleh khas Pejambon), Kegiatan usaha warga dalam membuat keset, batik. Hasilnya nanti ditampung dan dipasarkan oleh KUB. SARANA MANDIRI SEJAHTERA. Sedangkan kerjasama dengan OFFTAKER sebagai

Biro Traveling ini sangat bagus, karena banyak sekali pengunjung wisata yang menggunakan Biro perjalanan tersebut sehingga menjadikan wisata kami semakin ramai dan memudahkan pengunjung untuk datang menikmati wisata edukasi di Pejambon. Dari pernyataan di atas, dapat peneliti katakan bahwa dalam collaborative governance dalam pengembanaan desa wisata masyarakat non pemerintah memiliki keterkaitan yang besar dalam memberikan dukungan personil maupun kelompok yang sebelumnya sudah dibekali skill sesuai kemampuan masing-masing.

5) Media Masa

Media masa memiliki peran penting dalam proses pengembangan Desa Pejambon untuk menarik perhatian masyarakat luas sebagai penyebar informasi. Hasil Observasi di lapangan Dapat peneliti katakan Desa Pejambon pernah mendapatkan penghargaan tingkat nasaional dan kabupaten tidak lepas dari kinerja para apaaratur desa dan dukungan masyarakat, sampai saat ini Pejambon menjadi desa wisata yang dikenal seluruh masyarakat dengan system informasi dapat diakses online melalui website desa.

4.2. Pembahasan

1. Face to face dialoge

Bentuk collaborative governance dibangun dari dialog tatap muka secara langsung dari tiap stakeholder yang terlibat. Sebagaimana collaborative governance yang berorientasikan proses, dialog secara langsung sangat penting dalam rangka mengidentifikasi peluang dan keuntungan bersama.

Berdasarkan hasil penelitian, Dialog secara tatap muka langsung dalam proses pengembangan desa wisata di Desa Pejambon berawal mula dari kepercayaan pemprov kepada Pemerintah Desa Pejambon dalam mengikuti even Pemerintahan yang trasparan yang mampu menjadi Desa percontohan dalam pengelolaan keuangan desa, dan merambah dalam pengembangan desa wisata berbasis edukasi, selalu melibatkan semua pihak dalam pengelolaan keuangan sesuai tupoksi Pemerintah Desa.

Menurut Hasil Analisa dan interpretasi data yang dilakukan oleh penulis face to face yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan semua elemen masyarakat yang terkait dengan proses pengembangan wisata yang berkaitan dengan anggaran pengembangan telah dilakukan kolaborasi yang cukup baik seperti yang disampaikan oleh informan Desa Pejambon yang menyebutkan bahwa proses anggaran pengembangan desa wisata di musyawarahkan bersama untuk memperoleh keputusan bersama dan keterbukaan dalam penggunaan anggaran.

Selain itu menurut hasil analisa penulis yang mengacu pada kolaborasi dengan pendekatan penta helix, pengembangan desa wisata edukasi Desa Pejambon sudah melibatkan semua aktor dalam collaborative governance. Semua proses kolaborasi tersebut juga dilakukan secara face to face. Banyak sekali pihak yang terlibat, antara lain: pemerintah (Pemprov Jatim, Kemendes, Perangkat Desa), Dunia Usaha (masyarakat yang memiliki usaha/ toko sekitar wisata edukasi), Universitas atau Academisi (UNAIR), Organisasi Non Pemerintah (KUEMDes, OFFTAKER), Media Massa (Web dan Digital Marketing), masyarakat terdampak (Masyarakat Desa Pejambon dan sekitarnya).

Dengan demikian, proses collaborative governance dengan cara face to face menjadi salah satu alternatif diskusi antar pemangku kepentingan desa dan pihak terkait yang efektif karena diskusi secara langsung dapat meminimalisir resiko miskomunikasi atau kesalahpahaman antar stakeholder yang terlibat. Dan di Desa Pejambon tersebut lebih mengutamakan keterbukaan akses informasi kepada semua pihak sehingga stakeholder dapat bekerjasama sesuai dengan tujuan dan kebermanfaatan bersama.

2. Trust building

Buruknya rasa percaya antar stakeholder memang merupakan hal yang lumrah di awal proses kolaborasi. Kolaborasi memang bukan semata tentang negoisasi antar stakeholder, namun lebih dari itu merupakan upaya untuk saling membangun kepercayaan satu dengan yang lainnya.

Dari hasil penelitian, beberapa pernyataan pihak Desa Pejambon yaitu Kepercayaan yang terbentuk antar masyarakat dengan pemerintah dalam proses

pengembangan wisata dan pengelolaan dana pengembangan telah ada kepercayaan. Dari pengembangan kepercayaan yang terbentuk di Desa Pejambon penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam proses pengembangan desa wisata kepercayaan yang terbentuk antara pemerintah dengan masyarakat sangat baik, untuk pemasukan kas desa dari pengembangan wisata yang telah berkembang, namun pada saat ini kas desa tidak ada pemasukan dikarenakan penutupan tempat wisata hampir 1 tahun karna efek dari pandemi di Indonesia.

Pihak Desa Pejambon juga membangun kepercayaan dengan berbagai pihak seperti universitas yang membuat program kampus KKN yang di tempatkan di berbagai wilayah salah satunya di Desa Pejambon. Para mahasiswa dibekali ilmu pengetahuan dan diaplikasikan ketika mereka bera di Desa Pejambon. Dan hasilnya pun sangat baik. Program Kerja mahasiswa KKN bersama Desa Pejambon memberikan banyak manfaat yaitu di bidang pendidikan dan ekonomi serta membantu dalam pengembangan alur neraca keuangan, pengembangan potensi di bidang digital, pengembangan dan pembangunan sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat berupa penyuluhan dan pelatihan untuk masyarakat di Desa Pejambon. Selain itu, Desa Pejambon juga bekerja sama dengan pihak NGOs antara lain KUEMDes, OFFTAKER untuk pengembangan Desa Pejambon lebih baik lagi.

Dengan demikian, untuk terus menanamkan rasa percaya antar stakeholder dalam pengembangan desa wisata di Pejambon diperlukan suatu pemikiran yang positif, terus fokus pada tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan desa di Pejambon, terbuka, saling menghargai satu sama lain, dan tentunya diperlukan seorang pemimpin yang mampu menyadari akan pentingnya sebuah kolaborasi.

3. Commitment to process

Komitmen tentunya memiliki relasi yang kuat dalam proses kolaborasi. Komitmen merupakan motivasi untuk terlibat atau berpartisipasi dalam collaborative governance dalam pengembangan desa wisata di Pejambon.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai komitmen dapat disimpulkan bahwa komitmen dalam pengelolaan pariwisata di Desa Pejambon pihak yang melakukan sesuai aturan yaitu SK Kepala desa dan berusaha untuk

mempertahankan kerjasama agar tidak kendor, bekerjasama yang baik menjaga komitmen yang ada dengan kuat sehingga pada kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata berjalan dengan baik.

Desa Pejambon tidak hanya berkomitmen bersama stakeholder pemerintah desa dan masyarakat mealainkan juga melibatkan pihak lain, yaitu media masa sebagai digital marketing pengembangan wisata edukasi agar dapat di akses oleh semua lapisan masyarakat, pihak universitas (UNAIR) sebagai praktisi akademi memberikan pemikiran/ penelitian/ argumen/ inovasi/ dan bahkan ikut terlibat langsung dalam pengembangan desa wisata tersebut, dan yang terakhir adalah komitmen bersama dengan NGOs untuk memajukan desa wisata tersebut. Ketelibatan OFFTAKER sebagai biro traveling diharapkan menjadi marketing wisata edukasi di Pejambon, yang dalam hal ini pihak TPKK bekerja sama dengan PO. GALANG TRANS Desa wotan kecamatan Sumberrejo. Pihak NGOs lainnya adalah KUEMDes yaitu Kelompok Usaha Ekonomi masyarakat Desa yang nantinya dapat menampung hasil home industry dan pemasarannya dari masyarakat setempat. TPKK bekerjasama dengan “KUB. SARANA MANDIRI SEJAHTERA di Desa Pejambon.

Komitmen dari semua stakeholder akan berpengaruh terhadap keberlangsungan organisasi tersebut, untuk itu juga perlu adanya kesadaran untuk mempertahankan kerjasama tersebut baik itu dengan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, universitas, maupun organisasi non pemerintah. Dengan demikian, semua stakeholder dalam pengembangan desa wisata di Pejambon harus memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dan selalu mengutamakan komunikasi dan kerjasama untuk keberhasilan bersama.

4. Share Understanding

Pada poin yang sama dalam proses kolaborasi, stakeholder yang terlibat harus saling berbagi pemahaman mengenai apa yang dapat mereka (stakeholder) capai melalui kolaborasi yang dilakukan. Saling berbagi pemahaman ini dapat digambarkan sebagai misi bersama, tujuan bersama, obktivitas umum, visi bersama, ideologi yang sama, dan lain-lain. saling berbagi pemahaman dapat

berimplikasi terhadap kesepakatan bersama untuk memaknai dan mengartikan suatu masalah.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pemahaman bersama dapat diketahui bahwa dalam berkolaborasi dalam pengelolaan WEP berupaya membangun pemahaman bersama dengan pihak kelompok sadar wisata untuk menjaga hubungan dengan baik serta kepercayaan antara pihak yang berkolaborasi dengan melakukan komunikasi dan evaluasi mengenai kegiatan yang telah dilakukan. Kegiatan kolaborasi tersebut dilakukan secara terbuka agar semua pihak memahami dan tanpa ada kesalahpahaman antar pihak stakeholder yang terlibat.

Masyarakat Desa Pejambon pun juga merasakan dampak positifnya, karena mereka diberikan kesempatan untuk terlibat dalam pengembangan wisata edukasi tersebut bahkan dalam proses *share understanding* kepala desa sering mengajak diskusi dan saling bertukar pikiran untuk memajukan Desa Pejambon baik itu dengan Kemendes, masyarakat, pihak universitas, maupun dari organisasi non pemerintahan.

5. Intermediate outcomes

Hasil lanjutan dari proses kolaborasi terwujud dalam bentuk output atau keluaran yang nyata. Hal ini merupakan hasil proses yang kritis dan esensial dalam mengembangkan momentum yang dapat membimbing demi keberhasilan suatu kolaborasi.

Dari hasil penelitian tersebut *intermediate outcomes* setiap pihak yang terlibat memberikan hasil yang baik dalam pengembangan desa wisata Pejambon yaitu, pemerintah memberikan *outcome* dengan adanya keterbukaan akses informasi bagi masyarakat, baik itu anggaran maupun informasi lain yang berkaitan dengan Desa Pejambon, semakin terbukanya lapangan pekerjaan bagi warga sekitar di Desa Pejambon sehingga menambah pendapatan warga.

selain pihak pemerintah, terdapat pula sejumlah pihak yang ikut memberikan *outcome* terhadap pengembangan desa wisata Pejambon hasil kerjasama yang telah dicapai tersebut adalah semakin baiknya neraca keuangan Desa Pejambon, berkembangnya digitalisasi marketing dalam memperkenalkan

desa wisata Pejambon ke seluruh masyarakat lokal, terlaksananya pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana yang saat ini sudah memadai untuk digunakan dan dimanfaatkan oleh warga setempat, terealisasinya kegiatan penyuluhan dan pelatihan bagi warga (kesehatan, pendidikan, ekonomi kreatif), dan program “Gemar Berseri” Desa Pejambon yang terlaksana dengan baik dan melibatkan sebagian besar warga Desa Pejambon. Hasil kerjasama dengan KUEMDes berupa home industri di bidang makanan yaitu (oleh oleh khas Pejambon), Kegiatan usaha warga dalam membuat keset, batik. Hasilnya nanti ditampung dan dipasarkan oleh KUB. SARANA MANDIRI SEJAHTERA. Sedangkan kerjasama dengan OFFTAKER sebagai Biro Traveling ini sangat bagus, karena banyak sekali pengunjung wisata yang menggunakan Biro perjalanan tersebut sehingga menjadikan wisata kami semakin ramai dan memudahkan pengunjung untuk datang menikmati wisata edukasi di Pejambon.

Dari pernyataan para informan dapat penulis katakan bahwa dalam proses pengembangan wisata yang berawal mula dari desa yang menjalankan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan sehingga memperoleh penghargaan sebagai desa yang transparan yang mampu mengembangkan desa wisata telah memberikan hasil yang nyata memberikan sumbangan kas ke desa dari objek wisata, namun pada saat ini tidak ada akas dari wisata karna efek pandemi di desa wisata pejambon sehingga berdampak pada perawatan dan pengembangan desa wisata di Pejambon.

Intermediate outcome merupakan hasil kegiatan usaha yang dapat diidentifikasi dan diukur dalam waktu dekat, dan dijadikan sebagai indikator hasil jangka panjang. Hasil yang dicapai stakeholder di Desa Pejambon saat ini merupakan small outcomes yang bekerjasama saling terbuka, percaya dan tanggung jawab untuk menuju final outcomes. Untuk itu stakeholder Desa Pejambon terus berupaya yang terbaik, berinovasi untuk mengembangkan wisata edukasi agar dapat berkembang dan terus melakukan evaluasi sebagai tindak lanjut program pengembangan Desa Pejambon.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Collaborative Governance dalam pengembangan desa wisata Pejambon telah menerapkan kolaborasi antara pemerintah, BUMDes, masyarakat, dalam penyusunan anggaran untuk mengembangkan desa wisata Pejambon, kerjasama yang selalu melibatkan 5 aktor saling keterkaitan di Desa Pejambon, terstruktur dan komitmen memberikan tambahan kas untuk desa. Adapun yang berperan dalam Collaborative Governance dalam pengembangan Desa wisata di Pejambon, 5 aktor yang meliputi Aparatur pemerintah desa serta masyarakat Desa Pejambon dan Ketua BUMDes, Dunia Usaha, universitas, NGos (Organisasi non pemerintah), Media Massa.

5.2. Saran

- a. Kepala desa yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengambil keputusan hendaknya selalu menerapkan kolaborasi dalam segala keputusan untuk mencapai mufakat bersama, memperoleh hasil dan keputusan bersama.
- b. Aparatur pemerintah desa disarankan untuk selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel, partisipatif.
- c. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) harus lebih aktif dalam mengelola dan mengembangkan apa yang telah menjadi kesepakatan Desa Pejambon sebagai desa wisata edukasi yang memberikan pemasukan kas bagi desa dan masyarakat setempat menuju arah lebih makmur dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Bichler, B. F., & Lösch, M. (2019). Collaborative governance in tourism: Empirical insights into a community-oriented destination. In *Sustainability*. mdpi.com. <https://www.mdpi.com/2071-1050/11/23/6673>
- Dangi, T. B., & Petrick, J. F. (2021). Augmenting the role of tourism governance in addressing destination justice, ethics, and equity for sustainable community-based tourism. *Tourism and Hospitality*. <https://www.mdpi.com/2673-5768/2/1/2>
- Farizky, V., Warsono, H., & ... (2022). A Study of Collaborative Governance and Its Effect on Tourism Sector during the COVID-19 Pandemic in Indonesia. *Journal of Madani* <https://journal.srnintellectual.com/index.php/jmsc/article/view/139>
- Luna, A., Marinho, M. L. M., & Moura, H. P. de. (2020). Agile governance theory: operationalization. *Innovations in Systems and ...* <https://doi.org/10.1007/s11334-019-00345-3>
- Miles, B. M. & A. M. H. & J. S. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Sourcebook Of New Methode 3rd Edition*. Sage Publications.
- Mishra, H. (2020). *Leadership in VUCA World*. 22(1), 44–48.
- Naz, R., & Groves, E. (2020). *Agile governance in practice: Stories of Agile successes of the Government of Samoa*. sadil.ws. <http://www.sadil.ws/bitstream/handle/123456789/2744/81.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Ndivo, R. M., & Okech, R. N. (2020). Tourism Governance in Transition Period: Restructuring Kenya's Tourism Administration from Centralized to Devolved System. *Tourism Planning & Development*. <https://doi.org/10.1080/21568316.2019.1580210>
- Prasetyo, H. (2023). Management of Tourism Villages with Collaborative Governance in Kebumen District. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration)* <https://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/8730>
- Robina-Ramírez, R., Sánchez, M. S. O., & ... (2021). Tourism governance during the COVID-19 pandemic crisis: A proposal for a sustainable model to restore the tourism industry. In *Environment* Springer. <https://doi.org/10.1007/s10668-021-01707-3>
- Siakwah, P., Musavengane, R., & ... (2020). Tourism governance and attainment of the sustainable development goals in Africa. *Tourism Planning & ...* <https://doi.org/10.1080/21568316.2019.1600160>
- Sinaga, I. C. (2021). Collaborative governance in tourism development in Indonesia: study of south sumatera Province. In ... *of Public Administration and Governance*. pdfs.semanticscholar.org/5db8/473da58cae260e53a2d48e8bf16575e2dd1e.pdf

- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Sugiono, *metode penulisan kualitatif dan kuantitatif R&D*, Alfabeta Pers, Jakarta, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, CV Alfabeta, Bandung, 2017.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Tomaževič, N., Kovač, P., Ravšelj, D., Umek, L., & ... (2023). The Role of Agile Values in Enhancing Good Governance in Public Administration during the COVID-19 Crisis: An International Survey. In *Administrative ...* mdpi.com. <https://www.mdpi.com/2076-3387/13/12/248>
- Vargas, A. (2020). Covid-19 crisis: A new model of tourism governance for a new time. *Worldwide Hospitality and Tourism Themes*. <https://doi.org/10.1108/WHATT-07-2020-0066>
- Wijaya, A. A. M., Sa'ban, L. M. A., & ... (2023). OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF COLLABORATIVE GOVERNANCE IN LOCAL GOVERNMENT TOURISM PUBLIC POLICY. *Jurnal Administrasi ...*. http://www.journal.stialanmakassar.ac.id/index.php/jurnal_administrasi_negara/article/view/2681